



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM PERJANJIAN
KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI BAWAH TANGAN
DI KOPERASI SUMBER ARTO WONOSOBO**

TESIS

**Disusun
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

**Oleh :
FRANSISCA MELANI SINANDAR
11010210400103**

**PEMBIMBING :
H. KASHADI, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2012**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM PERJANJIAN
KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI BAWAH TANGAN
DI KOPERASI SUMBER ARTO WONOSOBO**

Disusun Oleh :

FRANSISCA MELANI SINANDAR

11010210400103

Disusun

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2

Program Studi Magister Kenotariatan

PEMBIMBING,

H. KASHADI, S.H., M.H

NIP. 19540624 198203 1 001

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM PERJANJIAN
KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI BAWAH TANGAN
DI KOPERASI SUMBER ARTO WONOSOBO**

Disusun Oleh :

FRANSISCA MELANI SINANDAR

11010210400103

Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 28 Maret 2012

Tesis Ini Telah Diterima
Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan

Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro

H. KASHADI, S.H., M.H

NIP. 19540624 198203 1 001

H. KASHADI, S.H., M.H

NIP. 19540624 198203 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Fransisca Melani Sinandar dengan ini menyatakan bahwa :

1. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di salah satu perguruan tinggi, sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
2. Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik atau ilmiah yang non komersial sifatnya.

Yang Menyatakan,

FRANSISCA MELANI SINANDAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas berkat dan karunia yang Tuhan berikan, sehingga penulis dapat menyusun tesis ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI BAWAH TANGAN DI KOPERASI SUMBER ARTO WONOSOBO.”** Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus ditempuh untuk memperoleh derajat S-2 pada program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Penulisan tesis ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan petunjuk yang penulis terima dari berbagai pihak. Untuk itu melalui kesempatan ini izinkanlah penulis untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung penulis dalam masa studi dan penulisan tesis ini. Teristimewa, ucapan terima kasih dan penghargaan ini penulis sampaikan secara khusus kepada, yang terhormat :

1. Bapak Prof. Sudharto P. Hadi, MES., Ph.D selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes, PKK., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang

3. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
4. Bapak H. Kashadi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing tesis ini, yang setiap saat bersedia memberikan waktunya dalam membimbing, mendorong dan memberikan banyak pencerahan kepada penulis selama ini;
5. Bapak Prof. Dr. Budi Santoso, SH., M.S., selaku Sekretaris I pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
6. Bapak Prof. Dr. Suteki, SH., M.Hum., selaku Sekretaris II pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
7. Hj. Sri Sudaryatmi, SH., M.Hum., selaku Dosen Wali Penulis;
8. Segenap Guru Besar dan Staf Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang secara professional memberikan dan membekali ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
9. Segenap pengajaran akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah banyak membantu kelancaran keperluan akademik selama masa perkuliahan;
10. Bapak Ronny Setiawan, ST , Ketua Koperasi Sumber Arto Kota Wonosobo;

11. Bapak Eko Budi Santoso, ST , Manajer Koperasi Sumber Arto Kota Wonosobo;
12. Semua responden yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis di dalam melakukan penelitian;

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penyusunan tesis ini jauh dari sempurna, yang semuanya tidak lepas dari kurangnya pengetahuan serta pemahaman penulis. Untuk semua ini penulis dengan hati terbuka mengharapkan saran atau kritik yang dapat memberikan manfaat dan dorongan bagi peningkatan kemampuan penyusunan dimasa yang akan datang.

Semarang , 03 Maret 2012

Penulis

FRANSISCA MELANI SINANDAR

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI BAWAH TANGAN DI KOPERASI SUMBER ARTO WONOSOBO

Koperasi merupakan organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Keanggotaan koperasi berdasarkan sukarela yang mempunyai hak dan kepentingan, hak dan kewajiban yang sama. Salah satu jenis usaha koperasi adalah simpan pinjam yang membantu anggotanya dalam perkreditan.

Koperasi Sumber Arto Wonosobo dalam memberikan pinjaman mewajibkan adanya jaminan. Terhadap jaminan benda bergerak pengikatannya dalam bentuk perjanjian penyerahan hak milik dan kepercayaan atas barang-barang yang dilegalisasi oleh notaris akan tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hal ini dikarenakan jika didaftarkan akan memerlukan biaya yang memberatkan debitur yang rata-rata berasal dari golongan usaha kecil menengah. Sehingga apabila terjadi kredit macet atau kredit bermasalah penyelesaiannya dilakukan dengan musyawarah antara kreditor dengan debitur. Hal ini dikarenakan prinsip koperasi yang mengutamakan kesejahteraan anggotanya dan bersifat kekeluargaan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris sehingga yang diteliti adalah asas hukum dan kaidah hukum yang masih berlaku namun juga didukung dengan data empiris yang berasal dari studi kepustakaan dan penelitian lapangan,

Hasil penelitian yang diperoleh adalah terjadinya perjanjian kredit dengan pengikatan jaminan fidusia di Koperasi Sumber Arto Wonosobo merupakan proses pemberian kredit yang melalui tahap pembuatan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokoknya kemudian dibuat pembebanan jaminan fidusia dengan akta notaris dan perlindungan hukum bagi kreditor jika debitur wanprestasi dalam hal jaminan fidusia tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia dibagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan secara umum yang diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara dan perlindungan secara khusus tercantum dalam perjanjian kreditnya dengan klausula penyerahan hak milik atas kepercayaan.

Kata Kunci : Jaminan fidusia, Perlindungan hukum

ABSTRACT

LAW PROTECTION FOR CREDITORS IN CREDIT AGREEMENT BY NON NOTARIAL CONTRACT OF FIDUCIARY GUARANTEE AT KOPERASI SUMBER ARTO WONOSOBO

Cooperative is an organization of social people's economy. The members cooperative are the volunteers with the same interest, right and obligation. One of the forms cooperative is savings and loan that helps its members in the sector of credit.

In giving loan, Koperasi Sumber Arto Wonosobo requires a guarantee. In terms of guarantee in the forms moveable goods, the receipt is in the form of right and property transfer agreement based on trust in the material goods, which is legalized by a notary deed but it is not registered to the fiduciary register office as regulated in article 11 of Law No.42/1999 on Fiduciary Transfer Ownership Guarantee because the registration will burden the debtors who commonly belong to small and medium scale of business group. In case the non-performing loan occurs, the creditor and debtors will solve their problem through deliberation because the principle of cooperative prioritizes the welfare of its members and family atmosphere.

This research is a empiric juridicial so studied are the principles of law and legal rules are still valid but its also supported by empirical data so that the data studied are originating from library study and field research.

This research result showed that the credit agreement with fiduciary at Koperasi Sumber Arto Wonosobo through the procedures, that are credit agreement as the main agreement, after that making the fiduciary into notary deed but it is not registered to fiduciary register office. So the legal protection for creditors if the second party breach of contract are divided into two, the first is the common legal protection according to Burgerlijk Wetboek section 1131 and 1132, and the second protection is specific legal protection is based on obligation debtor in credit agreement with fiduciary transfer of ownership guarantee.

Key word : Fiduciary Guarantee, Law Protection

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang ..	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	9
E. Kerangka Pemikiran	
1. Kerangka Konseptual	10
2. Kerangka Teoritis	10
F. Metode Penelitian	
1. Pendekatan Masalah	28

2. Spesifikasi Penelitian	29
3. Sumber dan Jenis Data	30
4. Teknik Pengumpulan Data	30
5. Teknik Analisis Data	32
G. Sistematika Penulisan	33

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian	35
2. Syarat sah Perjanjian	40
3. Prestasi dan Wanprestasi	44

B. Tinjauan Umum Tentang Kredit dan Perjanjian Kredit

1. Pengertian Kredit	46
2. Pengertian Perjanjian Kredit	50
3. Bentuk Perjanjian Kredit	54

C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

1. Sejarah Lahirnya Jaminan Fidusia	58
2. Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia	60
3. Ciri-ciri Jaminan Fidusia	62
4. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia	63
5. Terjadinya Jaminan Fidusia	66
6. Pengalihan Jaminan Fidusia	70

7. Hapusnya Jaminan Fidusia	72
8. Eksekusi Jaminan Fidusia	73

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan jaminan fidusia di bawah tangan di Koperasi Sumber Arto Wonosobo	75
B. Perlindungan hukum bagi kreditor dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di bawah tangan di Koperasi Sumber Arto Wonosobo	91

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	102
B. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis ekonomi yang pernah dirasakan pada tahun 1997 memberikan dampak luar biasa pada semua sektor. Hal ini jelas mempengaruhi pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional yang diharapkan dapat menciptakan dan menjadikan masyarakat Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di kalangan dunia usaha baik pihak swasta maupun pemerintah memegang peranan yang sama-sama penting. Dalam hal ini pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan pengembangan usaha bagi para pelaku usaha. Kegiatan usaha itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari apa yang dinamakan sumber modal untuk pengembangan usaha. Untuk itu perlu adanya sumber dana yang memadai untuk menjaga eksistensi dari perusahaan tersebut di masyarakat.

Berbagai cara ditempuh guna pemenuhan akan ketersediaan dana tersebut. Salah satu yang paling mudah adalah melalui permohonan pengajuan pinjaman sejumlah dana. Di kalangan

pengusaha atau pelaku usaha pinjam meminjam merupakan kegiatan yang sudah biasa terjadi dalam upaya pemenuhan akan ketersediaan modal. Pinjaman atas sejumlah dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana akan dipakai sebagai sumber modal guna kelancaran kegiatan usaha yang dilakukan oleh yang membutuhkan dana tersebut. Lembaga keuangan baik perbankan dan non bank yang mana salah satu kegiatan usahanya adalah menyediakan sumber dana dapat dijadikan sasaran dalam pemenuhan kebutuhan dana tersebut.

Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan non bank yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat golongan kecil dan menengah ikut pula berperan dalam pemberian dan penyaluran kredit. Dengan lembaga yang berbentuk koperasi simpan pinjam yang menghimpun dana dari anggotanya kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota dan masyarakat umum. Para anggota koperasi simpan pinjam menyimpan uangnya yang sementara belum digunakan, kemudian oleh pengurus koperasi uang tersebut disalurkan kepada para anggota atau masyarakat umum melalui kredit dengan tujuan membantu anggotanya. Dari sinilah awal mula pemberian kredit terjadi.

Koperasi di Indonesia dalam memberikan pinjaman kepada para anggotanya tidak berskala besar dan itupun terbatas pada barang-barang yang diperlukan untuk meningkatkan hasil usahanya. Koperasi Sumber Arto dalam memberikan pinjaman kepada anggotanya dengan syarat bagi setiap anggota yang ingin meminjam harus memberikan jaminan baik benda bergerak maupun tidak bergerak sebagai persyaratan memperoleh kredit atau pinjaman.

Dalam proses pemberian pinjaman oleh lembaga keuangan atau yang lebih dikenal dengan pemberian persetujuan kredit atas sejumlah dana yang dimohon oleh pihak debitor tersebut umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit. Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak untuk sama-sama tunduk dan menaati esensi dari apa yang sudah disepakati atau diperjanjikan di dalam perjanjian itu sendiri. Perjanjian kredit ini merupakan perjanjian pokok dimana memuat sejumlah utang piutang antara debitor dan kreditor.

Dalam pemberian kredit diperlukan adanya jaminan karena jaminan merupakan salah satu syarat disetujuinya permohonan atas permintaan kredit. Hal ini menjadi keharusan karena setiap pemberian kredit kepada pengusaha atau pelaku usaha

mengandung resiko, oleh karena itu perlu unsur pengaman dalam pengembaliannya. Unsur pengaman (*safety*) adalah salah satu prinsip dasar dalam pemberian kredit selain unsur keserasian (*suitability*) dan keuntungan (*profitable*)¹.

Dalam hal jaminan, bagi pihak debitor bentuk jaminan yang diberikan sekiranya tidak akan mengganggu kegiatan usahanya sehari-hari sedangkan bagi pihak kreditor benda yang dijaminakan itu sekiranya dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan rasa aman atas sejumlah dana pinjaman yang sudah diberikan. Bagi kreditor setidaknya bentuk jaminan yang diberikan oleh debitor dianggap mampu untuk mengganti sejumlah pinjaman yang telah diberikan. Hal ini tentunya perlu diperhatikan kedua belah pihak sebagai dasar perjanjian kredit yang dibuatnya.

Jaminan dalam rangka pemberian kredit dapat dibedakan atas dua bagian yaitu jaminan atas benda bergerak dan jaminan atas benda tidak bergerak atau benda tetap. Berkenaan dengan jaminan benda bergerak khususnya yang disebut dengan jaminan fidusia merupakan perjanjian *assecoir* yang mutlak ada dari perjanjian kredit yang dikehendaki oleh para pihak. Secara umum

¹ Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-Dasar Tehnik Pemberian Management Kredit*, (Jakarta : Bina Aksara, 1989), hlm.4

konstruksi fidusia merupakan penyerahan hak-hak milik berdasarkan kepercayaan.

Dalam khasanah ilmu hukum penyerahan kebendaan ini dikenal dengan *constitutum possessorium*; yang merupakan suatu bentuk penyerahan dimana barang yang diserahkan dibiarkan berada di bawah penguasaan pihak yang menyerahkan, jadi yang diserahkan hanya haknya saja.² Sedangkan dalam Pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa penyerahan suatu benda bergerak dilakukan dengan penyerahan nyata. Akan tetapi penyerahan secara *constitutum possessorium* tetap dapat dilakukan secara sah oleh karena pada dasarnya para pihak bebas memperjanjikan yang mereka kehendaki.³

Lembaga jaminan fidusia mengatur pemberian pinjaman atas dasar kepercayaan dimana objek perjanjian tersebut tetap berada ditangan di berhutang (debitor) hanya saja status kepemilikannya beralih kepada si berpiutang (kreditor) pemberi pinjaman. Oleh karena itu dalam pembebanan objek jaminan fidusia harus didaftarkan demi meminimalisir terjadinya wanprestasi oleh debitor yang ingkar janji seperti yang sudah diatur di dalam

² Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, (Jakarta : Gahlia Indonesia, 1985), hlm.44-45

³ *Loc.Cit*

Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atau yang lebih dikenal dengan sebutan UUF.

Dengan mendesaknya kebutuhan akan sumber dana permodalan maka pada akhir-akhir ini dalam pemberian kredit semakin dipermudah, misalkan dengan persyaratan yang ringan, jangka waktu pencairan dana cepat, praktis dan bunga yang sangat kompetitif sehingga masyarakat bisa dengan mudah memperoleh dana pinjaman tersebut. Salah satu yang paling mudah ditemui yaitu adanya pembebanan jaminan fidusia yang dilakukan di bawah tangan atau tidak didaftarkan. Akibatnya esensi yang sesungguhnya dalam prosedur permohonan dan pemberian kredit menjadi makin *fleksible* yang secara tidak langsung akan berdampak pada proses pengembalian pinjamannya itu sendiri. Para pihak sendiri akan mengalami kesulitan dalam penyelesaian masalahnya karena bertentangan dengan prosedur atau aturan hukum yang mengaturnya.

Permasalahan seperti itu masih sangat sering dijumpai dalam praktek di masyarakat, sehingga perlu dipikirkan bagaimana konsekuensi bila si berhutang dalam hal ini debitor wanprestasi yang perjanjian pembebanan jaminan fidusianya dilakukan di bawah tangan. Serta bentuk perlindungan hukum seperti apa

yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam kasus seperti itu.

Berdasarkan paparan diatas penulis tertarik untuk meneliti dan membahas konsekuensi antara perjanjian kredit dengan pembebanan jaminan fidusia yang dilakukan di bawah tangan dalam tesis dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI BAWAH TANGAN DI KOPERASI SUMBER ARTO WONOSOBO “**

B. Perumusan Masalah

Berdasar latar belakang tersebut diatas maka permasalahan yang akan dibahas :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di bawah tangan di Koperasi Sumber Arto Wonosobo ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di bawah tangan di Koperasi Sumber Arto Wonosobo ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam tesis ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di bawah tangan di Koperasi Sumber Arto Wonosobo
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kreditor dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di bawah tangan di Koperasi Sumber Arto Wonosobo

D. Manfaat Penelitian

Dengan dicapainya penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat ganda baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut :

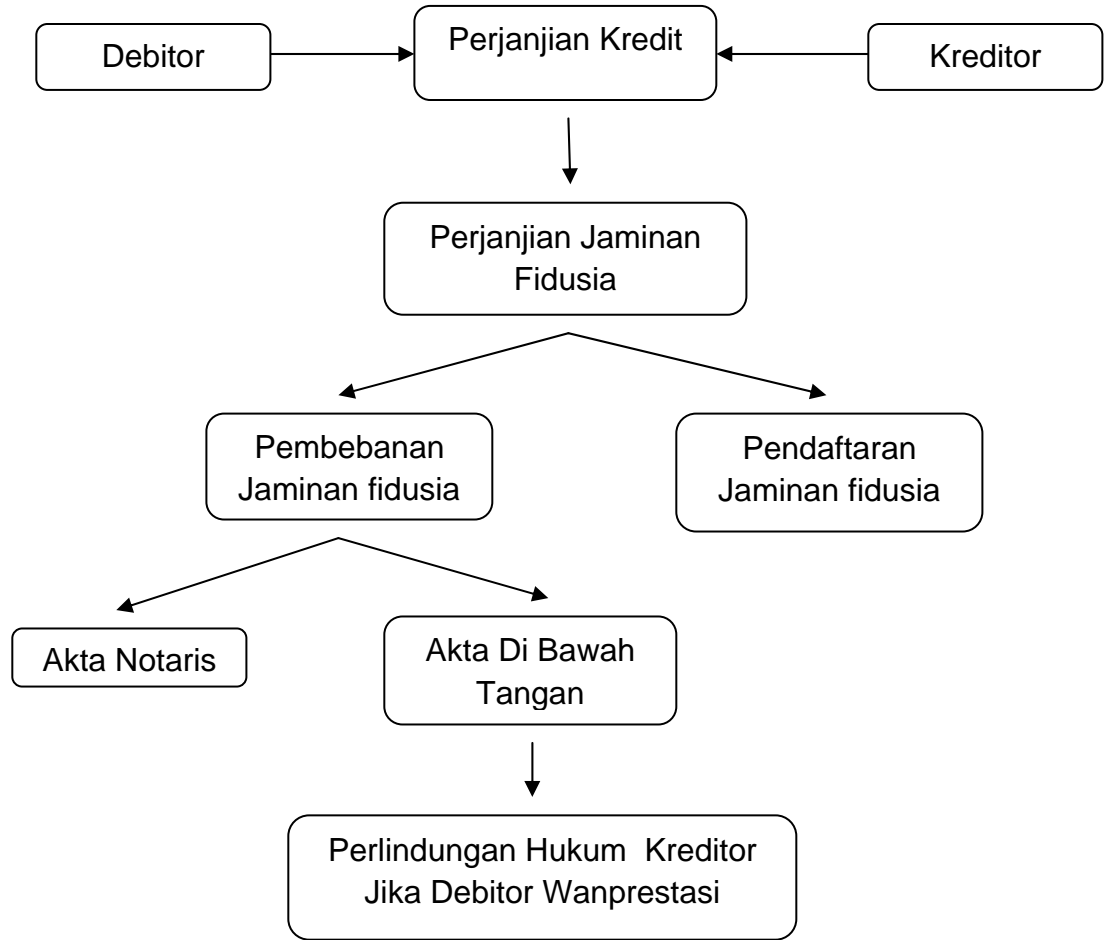
1. Manfaat Teoritis, dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran teoritis bagi pengembangan hukum jaminan fidusia dan menetapkan suatu peraturan perundang -undangan yang lebih tegas dan jelas setidak-tidaknya merevisi Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2. Manfaat Praktis, memaparkan analisis dan argumentasi hukum yang dibutuhkan bagi pelaksanaan penegakan hukum guna terciptanya iklim usaha yang adil dan kondusif serta menjamin kepastian hukum untuk para pelaku usaha juga bagi penegak hukum dan pejabat yang melaksanakan tugas di bidang fidusia.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam membahas permasalahan tersebut dalam kerangka konseptual dibutuhkan pendekatan secara teoritik yaitu melalui pendekatan kepustakaan dari berbagai pendapat para pakar dibidang hukum perjanjian dan jaminan fidusia. Adapun yang ditekankan dalam kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kerangka Konseptual



2. Kerangka Teoritis

a. Perjanjian Pada Umumnya

Ketentuan tentang perjanjian terdapat di dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan. Pengertian perikatan dapat diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau pihak, berdasarkan

mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut.⁴ Sedangkan perjanjian dapat diartikan sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang tersebut atau lebih berjanji untuk melakukan suatu hal.⁵

Dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Pengertian itu dirasakan kurang lengkap karena banyak mengandung kelemahan dan terlalu luas rumusannya serta hanya cocok untuk perjanjian sepihak saja.

Mariam Darus Badruzaman terhadap rumusan tersebut berpendapat bahwa definisi perjanjian tersebut sudah otentik rumusannya disatu sisi adalah tidak lengkap karena hanya menekankan pada perjanjian sepihak saja dan disisi lain terlalu luas karena dapat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan janji kawin yaitu sebagai

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Internusa,1992), hlm.1

⁵ *Ibid*, hlm.1

perbuatan yang terdapat dalam bidang hukum keluarga⁶
kata perbuatan juga mencakup perbuatan tanpa konsensus /
kesepakatan.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas agar
suatu perjanjian mempunyai kekuatan harus dipenuhi syarat
sahnya perjanjian. Menurut Abdulkadir Muhammad, syarat
sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :⁷

- 1). Adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang
membuat perjanjian (konsensus)

Persetujuan kehendak adalah kesepakatan, seia
sekata para pihak mengenai pokok perjanjian, apa yang
dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki pihak
yang lainnya. Sebelum memberikan persetujuan, para
pihak biasanya mengadakan perundingan, dimana pihak
yang satu memberitahukan kepada pihak yang lain
mengenai objek perjanjian dan syarat-syaratnya,
kemudian pihak yang lain menyatakan pula kehendaknya
sehingga tercapai persetujuan. Kehendak tersebut dapat

⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1994),
hlm.18

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,
2000), hlm.228

disampaikan secara bebas maupun diam-diam, tetapi maksudnya menyetujui apa yang dikehendaki oleh para pihak tersebut. Bebas diartikan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga dan berdasarkan kemauan sukarela para pihak. Selain itu pengertian persetujuan kehendak termasuk juga tidak adanya kekhilafan dan penipuan. Akibat hukum tidak adanya persetujuan kehendak maka perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim.⁸

2). Kecakapan para pihak

Kecakapan berbuat adalah kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum sendiri yang dilakukan oleh subjek hukum. Pada umumnya, seseorang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum berumur 21 tahun.

Menurut Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang dikatakan tidak cakap membuat perjanjian ialah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, dan wanita bersuami,

⁸ *Ibid.*, hlm. 230

sehingga apabila hendak melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh walinya dan bagi seorang istri harus ada izin suaminya.

Akibat hukum ketidakcakapan membuat perjanjian ialah bahwa perjanjian yang telah dibuat itu dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim, dan apabila pembatalannya tidak dimintakan oleh pihak yang berkepentingan maka perjanjian tetap berlaku⁹.

3). Suatu hal atau objek tertentu

Suatu hal atau objek tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian dan prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan.

4). Adanya suatu sebab yang halal

Kata *causa* berasal dari bahasa Latin yang artinya sebab. Sebab adalah suatu yang menyebabkan dan mendorong orang membuat perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengartikan *causa* yang halal bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau

⁹ *Ibid.*, hlm.231

mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak.

Ketentuan dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa Undang-Undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, karena yang diperhatikan atau diawasi oleh Undang-Undang itu ialah “isi perjanjian itu”, yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak serta isinya tidak dilarang oleh Undang-Undang, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum¹⁰

Mengenai kesepakatan diantara para pihak yang diatur dalam Pasal 1321-1328 KUHPerdata dan kecakapan dalam bertindak orang perorangan yang diatur dalam Pasal 1329-1331 KUHPerdata. Kedua syarat tersebut merupakan syarat subjektif yaitu syarat mengenai subjek hukum atau orangnya. Apabila syarat subjektif ini tidak dipenuhi dalam suatu perjanjian maka berakibat dapat dibatalkan. Sedangkan syarat objektif diatur dalam Pasal 1332-1334 KUHPerdata mengenai keharusan adanya suatu objek

¹⁰ *Ibid.*, hlm.232

dalam perjanjian dan Pasal 1335-1337 KUHPerdato mengatur kewajiban suatu causa yang halal dalam setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Kedua syarat terakhir disebut dengan syarat objektif, apabila tidak dipenuhi maka akan berakibat batal demi hukum.

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas penting yang perlu diketahui antara lain :

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Pasal 1320 angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan hak kepada para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian untuk menyusun dan membuat kesepakatan apa saja dan dengan siapa saja, selama dan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Asas Konsensualitas

Hukum perjanjian memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak untuk membuat perjanjian yang akan mengikat mereka sebagai undang-undang selama dan sepanjang dapat dicapai kesepakatan oleh para pihak dan dilaksanakan dengan itikad baik

sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3) Asas Personalia

Asas ini diatur dan ditemukan di dalam Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dipertegas dalam Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹¹

Maksud dari asas ini adalah bahwa perjanjian itu hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Secara spesifik menunjuk kewenangan seseorang untuk bertindak atas dirinya sendiri.

b. Perjanjian Kredit Pada Umumnya

Kata kredit berasal dari bahasa Romawi "*credere*" yang artinya "percaya". Dalam bahasa Belanda istilahnya "*vertrouwen*", dalam bahasa Inggris "*believe*" atau "*trust*" atau "*confidence*", yang kesemuanya berarti percaya.¹² Dalam masyarakat umum, istilah kredit sudah tidak asing lagi dan bahkan dapat dikatakan populer dan merakyat, sehingga dalam bahasa sehari-hari sudah dicampur adukkan begitu saja

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta : Liberty, 1986), hlm.33

¹² Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 23

dengan istilah hutang. Tetapi, sungguh pun kata kredit sudah berkembang kemana-mana, dalam tahap apapun dan kemana pun arah perkembangannya, dalam setiap kata kredit tetap mengandung unsur “kepercayaan”, walaupun sebenarnya kredit itu bukan hanya sekedar kepercayaan.

Pengertian ataupun rumusan perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu untuk memahami pengertian perjanjian kredit perlu dikemukakan pendapat para sarjana.

Beberapa sarjana hukum, seperti Subekti berpendapat bahwa “dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakekatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata.”¹³

Hal yang sama dikemukakan pula oleh Badruzaman bahwa: “dari rumusan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perbankan mengenai perjanjian kredit, dapat disimpulkan

¹³ Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung : Cipta Aditya Bakti, 1991), hlm.3

bahwa dasar perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam di dalam KUHPerdata Pasal 1754.”¹⁴

Rumusan perjanjian pinjam-meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata, adalah “Perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Perjanjian kredit adalah suatu perjanjian pokok yang bersifat riil artinya terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitor. Perjanjian kredit harus diikuti dengan penyerahan uang secara riil kepada debitor. Dalam praktek, ada kemungkinan pinjaman yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit tidak jadi dicairkan. Ini terjadi jika kreditur mendapat informasi baru yang tidak menguntungkan tentang debitor. Ada juga kemungkinan bahwa besarnya jumlah yang diserahkan berlainan dengan jumlah yang semula disetujui di dalam perjanjian kredit.

Keberadaan perjanjian kredit sangat penting karena berfungsi sebagai dasar hubungan kontraktual antara para

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit*, hlm.110

pihak. Dalam perjanjian kredit dapat ditelusuri berbagai hal tentang pemberian, pengelolaan ataupun penatalaksanaan kredit itu sendiri.

Dari pengertian di atas terlihat dengan jelas adanya beberapa unsur kredit. Berkaitan dengan hal ini, Suyatno mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut :¹⁵

- 1). Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
- 2). Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterimanya pada masa yang akan datang.
- 3). *Degree of risk*, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin

¹⁵ Thomas Suyatno, et al., *Dasar-dasar Perkreditan*, (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm.14.

lama kredit diberikan berarti semakin tinggi pula tingkat resikonya.

Prestasi atau objek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit dalam bentuk uanglah yang lazim dalam praktek perkreditan.

Tujuan pemberian kredit itu sendiri didasarkan atas keuntungan atau manfaat dari kedua belah pihak. Bagi pemberi kredit mendapat keuntungan berupa bunga, biaya administrasi, provisi, atau biaya lain yang dibebankan kepada debitor. Bagi debitor usaha nasabah atau debitor akan meningkat, dengan pemberian kredit investasi atau kredit modal diharapkan akan meningkatkan usahanya. Secara tidak langsung pemberian kredit juga akan bermanfaat positif karena dengan banyaknya kredit yang disalurkan mampu meningkatkan pembangunan di sektor ekonomi, sehingga membantu tugas pemerintah.

c. Jaminan Fidusia Pada Umumnya

Hukum Jaminan adalah keseluruhan kaedah-kaedah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitaannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan jaminan fasilitas kredit. Sedangkan Jaminan adalah suatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.¹⁶

Pokok Peraturan yang mengatur tentang jaminan fidusia di Indonesia sudah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atau disebut UUF pada tanggal 30 September 1999. Dalam Pasal 1 angka 1 UUF, dijumpai pengertian Fidusia sebagai berikut pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu. Pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia

¹⁶ Purwahid Patrik dan Kashadi. *Hukum Jaminan Fidusia*, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008), hlm 5

kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi obyeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia. Definisi ini didasarkan pada konstruksi hukum adat, karena istilah yang digunakan adalah pengoperan, pengoperan diartikan sebagai suatu proses atau cara mengalihkan hak milik kepada orang lain.

Istilah Jaminan Fidusia ini dikenal dalam Pasal 1 angka 2 UUF, Jaminan Fidusia adalah Hak Jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam UU Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Dari pengertian di atas, dapat diketahui unsur-unsur jaminan fidusia meliputi adanya hak jaminan; adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan; benda yang

menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia; dan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia.

Perjanjian Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi.¹⁷ Pembebanan jaminan fidusia dituangkan dalam bentuk perjanjian. Biasanya dalam memberikan pinjaman uang, kreditor mencantumkan dalam perjanjian itu bahwa debitor harus menyerahkan barang-barang tertentu sebagai jaminan pelunasan utangnya.¹⁸

Adapun prinsip utama dari jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

- 1). bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.
- 2). hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitor.

¹⁷ *Ibid.*, hlm 36

¹⁸ Oey Hoey Tiong, *Op.Cit*, hlm. 21

- 3). apabila hutang sudah dilunasi, maka obyek jaminan fidusia mesti dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.
- 4). jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.¹⁹

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atau UUF mewajibkan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan pada lembaga pendaftaran fidusia untuk memperoleh sertifikat jaminan fidusia. Dalam hal ini benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini merupakan terobosan penting yang melahirkan fidusia sehingga dapat memenuhi asas publisitas semakin terpublikasi jaminan hutang, akan semakin baik, sehingga kreditor atau khalayak ramai dapat mengetahui dan dapat mengakses untuk informasi-informasi penting di sekitar jaminan hutang tersebut.

Pembebanan jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokoknya, dalam hal ini perjanjian pokoknya adalah perjanjian utang piutang. Proses terjadinya

¹⁹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 151

jaminan fidusia dilakukan dengan 2 tahap yaitu tahap pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia. Pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia bertujuan memberikan kepastian hukum bagi kreditor mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya dalam pelunasannya.

Berkaitan dengan pelunasan utang debitor, maka kreditor biasanya melakukan eksekusi atas benda yang dijaminan oleh debitor yang melakukan wanprestasi. Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan atau keputusan pengadilan atau akta, maka pengambilan pelunasan kewajiban kreditor melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitor.

Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan beresiko. Kreditor bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditor. Bisa juga karena mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak *full* sesuai dengan nilai barang. Atau, debitor sudah melaksanakan kewajiban sebagian dari perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa

diatas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitor dan sebagian milik kreditor. Apalagi jika eksekusi tersebut tidak melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat digugat ganti kerugian. Oleh karena itu, eksekusi merupakan bukan hal yang mudah untuk itu butuh jaminan hukum dan dukungan aparat hukum secara legal. Di sinilah perlunya urgensi perlindungan hukum yang seimbang antara kreditor dan debitor.

F. Metode Penelitian

Metode, adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk mencegah masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²⁰

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm.6

Menurut Sutrisno Hadi, metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana caranya atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.²¹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris atau dengan kata lain disebut normatif empiris. Seperti yang disampaikan oleh Abdul Kadir Muhammad bahwa Penelitian hukum normatif empiris (*applied law research*) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²²

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001), hlm. 46

²² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.134

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah berupa penelitian studi kasus dengan penguraian secara Deskriptif Analistis. yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan-keadaan atau gejala-gejala lainnya.²³

Deskriptif diartikan memberikan gambaran yang dipaparkan secara rinci dan sistematis menyeluruh tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi Kreditor jika debitor wanprestasi terhadap akta jaminan fidusia dibawah tangan. Analistis bermakna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi tanda bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor jika debitor wanprestasi terhadap akta jaminan fidusia dibawah tangan penjelasan tentang pelaksanaan perjanjian kredit dengan pembebanan jaminan fidusia dibawah tangan di Koperasi Sumber Arto Wonosobo.

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yumetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 9.

3. Sumber Dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari informasi yang di dapat dari penelitian dengan pihak-pihak terkait yakni Manajer Koperasi Sumber Arto Wonosobo dan beberapa orang debitor koperasi , yang mana hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Data sekunder merupakan data yang dapat mendukung atau menunjang data primer yang dipakai dalam menjawab permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Sukanto dalam penelitian terdapat jenis sarana pengumpulan data antara lain :²⁴

- a. Studi dokumen atau bahan pustaka
- b. Wawancara

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis empiris sehingga penulis menggunakan metode pengumpulan data primer dan data sekunder.

²⁴ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hal 66

- a. Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari masyarakat.²⁵ Data primer ini diperoleh melalui wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawancara berlangsung. Wawancara dilakukan dengan pihak yang terkait dalam hal ini diwakili oleh manajer Koperasi Sumber Arto Wonosobo dan beberapa orang anggota koperasi sebagai debitor.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.²⁶ Data sekunder ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan fokus penelitian, yang terdiri dari :
- 1). Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat dengan fokus utama berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dokumen dan lain-lain yang berhubungan dengan jaminan fidusia. Dalam hal ini yang dipakai adalah Kitab Undang-

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hlm. 24

²⁶ *Loc.Cit.*,

Undang hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

- 2). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang memberi penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer berupa ulasan hukum atau lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- 3). Bahan hukum tersier / bahan penunjang, yaitu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa kamus, jurnal ilmiah, ensiklopedi, majalah, surat kabar, dan lain-lainya.

5. Teknik Analisis Data

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu hasil-hasil penelitian disatukan dengan analisa data²⁷. Setelah itu, hasilnya akan disajikan secara deskriptif yang yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan diteliti, dari hasil tersebut kemudian akan ditarik kesimpulan dan disusun secara sistematis yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai karya ilmiah proposal

²⁷ *Ibid*, hlm. 69

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memberikan arah penulisan serta agar terlihat terdapatnya rangkaian tulisan yang tersusun dengan serasi dalam suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, maka tulisan ini dibuat dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan dan mengemukakan secara berurut latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan mengenai uraian tinjauan tentang perjanjian, tinjauan tentang perjanjian kredit, dan tinjauan tentang jaminan fidusia berdasar Undang-Undang nomor 42 tahun 1999.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas mengenai hasil penelitian yang berupa data-data yang diperoleh, sesuai yang dijelaskan pada bab

pendahuluan, kemudian langsung dianalisa. Analisa diarahkan untuk menjawab semua rumusan masalah. Memuat uraian tentang pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia di Koperasi Sumber Arto Wonosobo dan langkah yang ditempuh oleh Koperasi Sumber Arto Wonosobo dalam hal perlindungan hukum bagi kreditor dalam perjanjian kredit terhadap debitor yang wanprestasi.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan sebagai rekomendasi penulis berdasarkan ide dan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313, Pengertian suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Mengenai batasan definisi perjanjian diatas masih ditemukan beberapa kelemahan-kelemahan atau dapat dikatakan batasan tersebut masih dirasa terlalu luas pengertiannya. Adapun kelemahan tersebut dapat diperinci sebagai berikut :²⁸

a. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja

Dikatakan menyangkut perjanjian sepihak saja dapat diketahui dari rumusan "satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya" kata "mengikatkan" merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Sedangkan maksud yang terkandung dari batasan dalam pasal tersebut sebagai

²⁸ Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, (Yogyakarta : Pohon Cahaya, 2011), hlm. 87-89

suatu perjanjian mengikatkan diri dari kedua belah pihak, sehingga nampak kekurangannya di mana setidaknya perlu adanya rumusan “saling mengikat diri”. Jadi jelas tampak adanya konsensus / kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian.

- b. Kata perbuatan mencakup juga perbuatan tanpa konsensus / kesepakatan

Dalam pengertian perbuatan orang dapat mengartikan termasuk juga perbuatan :

- 1). Melaksanakan tugas tanpa kuasa
- 2). Perbuatan melawan hukum

Dua perbuatan tersebut di atas merupakan tindakan yang tidak mengandung adanya konsensus atau tidak adanya kesepakatan, tetapi berdasar undang-undang.

Perbuatan itu sendiri pengertiannya sangat luas, karena sebetulnya maksud perbuatan yang ada dalam rumusan tersebut adalah perbuatan hukum, bukan perbuatan biasa.

- c. Pengertian perjanjian terlalu luas

Untuk pengertian perjanjian di sini dapat diartikan juga pengertian perjanjian yang mencakup melangsungkan perkawinan, perjanjian kawin (janji kawin). Padahal perkawinan sendiri sudah diatur tersendiri dalam hukum keluarga, yang

menyangkut hubungan lahir batin. Sedang yang dimaksudkan dengan perjanjian pada Pasal 1313 KUHPerdara adalah hubungan antara debitor dan kreditor terletak dalam lapangan harta kekayaan saja selebihnya tidak. Jadi yang dimaksud perjanjian kebendaan saja bukan perjanjian personal.

d. Tanpa menyebut tujuan

Dalam perumusan pasal itu tidak disebutkan apa tujuan untuk mengadakan perjanjian sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri itu tidak jelas apa maksudnya mengikatakan diri itu.

Atas dasar beberapa alasan tersebut di atas maka dirasakan perlu adanya perumusan pengertian perjanjian yang mencerminkan kesepakatan kedua belah pihak yang mewakili apa yang dimaksud dari isi perjanjian yang dibuatnya tersebut.

Perjanjian menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian* sebagai berikut: “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang atau lebih berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”²⁹

²⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Internusa, 1992), hlm.1

Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa tersebut lahirlah hubungan diantara dua orang atau lebih tersebut apa yang dinamakan dengan perikatan.

Perjanjian adalah merupakan bagian sumber dari perikatan dan perikatan itu mempunyai cakupan yang lebih luas dari pada perjanjian. Mengenai perikatan itu sendiri diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana diketahui bahwa suatu perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang.

Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUHPerdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.³⁰

Berdasarkan berbagai pendapat mengenai perjanjian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian dari :

a. Adanya para pihak

Para pihak dalam perjanjian sedikit ada dua orang yang disebut sebagai subjek perjanjian. Yang menjadi subjek perjanjian dapat

³⁰ AbdulKadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 78

dilakukan oleh orang maupun badan hukum yang mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan oleh undang-undang.

b. Adanya persetujuan antara para pihak

Persetujuan tersebut bersifat tetap yang dihasilkan dari suatu perundingan yang pada umumnya membicarakan syarat-syarat yang akan dicapai.

c. Adanya tujuan yang akan dicapai

Tujuan yang akan dicapai dalam perjanjian tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.

d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan

Prestasi adalah suatu hal yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

e. Adanya bentuk-bentuk tertentu

Bentuk-bentuk tertentu yang dimaksud adalah secara lisan maupun tulisan, sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

f. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

Dari syarat-syarat tertentu ini dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-syarat ini terdiri dari syarat-syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Selain perjanjian, perikatan juga lahir dari undang-undang. Jadi ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan ada perikatan yang lahir karena undang-undang. Dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara disebutkan syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu :³¹

a. Sepakat mereka yang telah mengikatkan diri

Didalam melakukan suatu kontrak atau perjanjian maka kedua pihak harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan dirinya, dalam hal ini harus dinyatakan secara tegas atau dapat dapat dinyatakan secara diam-diam, atau dengan kata lain para pihak dalam berkontrak harus mempunyai kesepakatan dalam bertindak atau mengenai hal yang pokok dalam perjanjian. Artinya apa yang dikehendaki oleh salah satu pihak harus juga merupakan kehendak dari pihak lain. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak adanya kemauan yang bebas didalam pembuatan kontrak berarti terdapat unsur penipuan, kekhilafan atau hal-hal yang bersifat memaksa. Paksaan yang dimaksud dapat berupa paksaan rohani atau paksaan jiwa, yang berarti paksaan badan tidak dapat dijadikan

³¹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung : Alumni, 1977), hlm.3

alasan adanya paksaan. Sedangkan penipuan terjadi apabila seseorang dengan sengaja melakukan atau memberikan keterangan-keterangan yang tidak sah disertai dengan tipu daya sehingga mengakibatkan kerugian terhadap pihak lawan. Terdapat perbedaan antara pemaksaan dan penipuan yaitu pemaksaan dapat dilakukan oleh pihak ketiga atau pihak lawan, sedangkan dalam penipuan hanya dapat dilakukan oleh pihak lawan saja.

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Mengenai kecakapan bertindak dalam hukum khususnya dalam hal pembuatan kontrak pada dasarnya seseorang adalah berhak atau cakap dalam membuat kontrak, kecuali apabila telah ditentukan oleh undang-undang. Pada umumnya orang itu dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya telah mencapai umur 21 tahun atau sudah menikah meskipun umurnya belum 21 tahun (Pasal 330 KUHPerdata). Sedangkan orang-orang yang tidak cakap dalam bertindak membuat suatu kontrak telah diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata dimana disebutkan bahwa orang-orang yang tidak cakap adalah :

- 1) Orang yang belum dewasa atau masih dibawah umur
- 2) Orang yang dibawah pengampuan.

3) Seseorang yang didalam hal-hal tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melanggarnya.

Orang-orang tersebut diatas apabila melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh orang tua atau wali atau pengampu mereka dan bagi para isteri (wanita bersuami) harus mendapat ijin terlebih dahulu dari suami. Namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03/1963 wanita bersuami tidak harus mendapat ijin terlebih dahulu dari suaminya karena telah dianggap mampu berbuat hukum.

c. Mengenai suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, suatu peristiwa yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian dan merupakan objek dari perjanjian. Apa saja yang menjadi objek dari perjanjian haruslah disebutkan dalam perjanjian secara jelas, misalnya mengenai peralatan, pembagian keuntungan dan lain-lain.

d. Suatu sebab yang halal

Mengenai suatu sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdara bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang untuk membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan

tujuan yang akan dicapai. Dalam Pasal 1335 KUHPPerdata menyebutkan ketentuan bahwa suatu persetujuan atau perjanjian tanpa sebab yang halal atau yang dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang maka tidak akan mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan yang dimaksud suatu sebab yang halal adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan UU, kesusilaan dan ketertiban umum. Apabila suatu perjanjian batal demi hukum maka berarti dari sejak semula tidak pernah terjadi suatu perjanjian sehingga tidak pernah ada perikatan. Pada akhirnya tujuan dari para pihak untuk mengadakan suatu perikatan gagal, dengan konsekuensi para pihak tidak dapat saling menuntut di depan hakim.

Berdasar uraian syarat-syarat sahnya perjanjian di atas dapat dipisahkan menjadi dua bagian pokok, yaitu :³²

1). Syarat Subjektif

Perjanjian yang tidak memenuhi unsur persetujuan kehendak/ kesepakatan pihak-pihak dan tidak adanya unsur kecakapan dalam bertindak untuk membuat perjanjian akan membawa akibat perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan.

³² Achmad Busro, *Op.Cit.* hlm.93

2). Syarat Objektif

Perjanjian yang tidak memenuhi unsur objek tertentu dan kausa yang halal, misalnya perjanjian yang dilarang itu membawa akibat perjanjian batal demi hukum

3. Prestasi dan Wanprestasi

a. Prestasi

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian menurut Pasal 1234 KUHPerdara ada tiga macam prestasi yang dapat diperjanjikan untuk tiap perikatan, yaitu :

- 1). Untuk memberikan sesuatu
- 2). Untuk berbuat sesuatu
- 3). Untuk tidak berbuat sesuatu

Agar prestasi dapat dilaksanakan maka perlu diketahui sifat-sifat prestasi, yaitu :

- 1). Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan
- 2). Harus mungkin
- 3). Harus diperbolehkan
- 4). Harus ada manfaat dari kreditur
- 5). Harus terdiri dari suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan

Jika salah satu atau semua sifat tersebut tidak terpenuhi pada prestasi itu, maka perikatan dapat menjadi tidak berarti dan perikatan itu menjadi batal atau dapat dibatalkan.³³

b. Wanprestasi

Seorang debitur baru dapat dikatakan wanprestasi jika ia tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan. Jadi debitor yang dianggap melakukan wanprestasi apabila seharusnya memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan tetapi ternyata mengingkari tidak memenuhi prestasi tersebut. Adapun bentuk ingkar janji atau wanprestasi ada 3 (tiga), yaitu :³⁴

- 1). Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
- 2). Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi
- 3). Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya

Wanprestasi membawa akibat yang merugikan bagi kreditor, oleh karena itu untuk mengantisipasinya kreditor berhak meminta ganti kerugian atas wanprestasi yang telah dilakukan, meminta benda atau objek yang menjadi objek perikatan serta dapat meminta pembatalan atau pemutusan perjanjian.

³³ AbdulKadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm 20

³⁴ Achmad Busro, *Op.Cit*, hlm.25

Memperhatikan adanya akibat dari wanprestasi atau ingkar janji maka kreditor dapat mengajukan salah satu tuntutan dari 5 (lima) kemungkinan gugatan yang dapat diajukan, antara lain :³⁵

- 1). Dapat mengajukan tuntutan pembatalan / pemutusan perjanjian
- 2). Dapat mengajukan tuntutan pemenuhan perjanjian
- 3). Dapat mengajukan tuntutan pengganti kerugian
- 4). Dapat mengajukan tuntutan pembatalan / pemutusan perjanjian dan pengganti kerugian
- 5). Dapat mengajukan tuntutan pembatalan / pemutusan perjanjian dan pemenuhan perjanjian

B. Tinjauan Umum Tentang Kredit dan Perjanjian Kredit

1. Pengertian Kredit

Dalam masyarakat umum, istilah kredit sudah tidak asing lagi dan bahkan dapat dikatakan populer dan merakyat, sehingga dalam bahasa sehari-hari sudah dicampur-adukan begitu saja dengan istilah hutang. Tetapi, sungguh pun kata kredit sudah berkembang kemana-mana, dalam tahap apapun dan kemana pun arah perkembangannya, dalam setiap kata kredit tetap

³⁵ *Ibid*, hlm. 27

mengandung unsur “kepercayaan”, walaupun sebenarnya kredit itu bukan hanya sekedar kepercayaan.

Menurut Simorangkir, pengertian kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang dan barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi), akan terjadi pada waktu mendatang.³⁶

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan memberikan definisi tentang kredit : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Pada prinsipnya perjanjian kredit tidak berbeda dengan perjanjian pada umumnya, karena dalam perjanjian kredit juga dijumpai kewajiban antara debitor dan kreditor, kesepakatan, kemampuan bertindak oleh para pihak, suatu sebab yang halal dan tentang sesuatu tertentu. Akibatnya perjanjian kredit pun

³⁶ Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersil*, (Jakarta : PT. Aksara Persada Indonesia, 1988), hlm.91

harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1233-1864.³⁷

Menurut Moh. Tjoekam unsur-unsur kredit antara lain :³⁸

a. Waktu

Adanya jarak saat persetujuan pemberian kredit dan pelunasannya.

b. Kepercayaan

Hal yang melandasi pemberian kredit oleh kreditor kepada debitor adalah setelah jangka waktu tertentu debitor akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak.

c. Penyerahan

Pihak kreditor harus menyerahkan nilai ekonomi kepada debitor yang harus dikembalikannya setelah jatuh tempo

d. Resiko

Adanya resiko yang akan timbul sepanjang jarak antara memberikan kredit dan pelunasannya.

³⁷ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), hlm.23

³⁸ Moh. Tjoekam, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial (Konsep dan Teknik Kasus)*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm.2-3

e. Persetujuan atau perjanjian

Hubungan hukum antara debitor dengan kreditor dibuktikan dengan adanya perjanjian yang merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak.

Suatu kredit mencapai fungsinya, baik bagi debitor, kreditor, maupun masyarakat, apabila secara sosial ekonomis membawa pengaruh yang lebih baik. Bagi pihak debitor dan kreditor sama-sama memperoleh keuntungan, dan mengakibatkan tambahan penerimaan negara dari pajak, serta membawa dampak kemajuan ekonomi yang bersifat mikro maupun makro.

Menurut Budi Untung disebutkan bahwa kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut :³⁹

- a. Meningkatkan daya guna uang;
- b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang;
- c. Meningkatkan daya guna dan peredaran uang;
- d. Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi;
- e. Meningkatkan kegairahan usaha;
- f. Meningkatkan pemerataan pendapatan; dan
- g. Meningkatkan hubungan internasional

³⁹ Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*. (Yogyakarta : Andi Offset, 2000), hlm.4

2. Pengertian Perjanjian Kredit

Pengertian ataupun rumusan perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, maupun dalam KUH Perdata. Oleh karena itu untuk memahami pengertian perjanjian kredit perlu dikemukakan pendapat para sarjana.

Beberapa sarjana hukum, seperti Subekti berpendapat bahwa “dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakekatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata.”⁴⁰

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Marhainis Abdul Hay bahwa, “perjanjian kredit adalah identik dengan perjanjian pinjam meminjam dan tunduk kepada ketentuan Bab XIII dari Buku III KUH Perdata.”⁴¹

Hal yang sama dikemukakan pula oleh Badruzaman bahwa: “dari rumusan yang terdapat di dalam Undang-undang perbankan mengenai perjanjian kredit, dapat disimpulkan bahwa

⁴⁰ Subekti, *Op.Cit*, hlm.3

⁴¹ Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung : PT. Pradnya Paramita, 1975), hlm. 67

dasar perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam di dalam KUH Perdata Pasal 1754.”⁴²

Rumusan perjanjian pinjam-meminjam menurut pasal 1754 KUH Perdata, adalah : “Perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Adapun sarjana lainnya, seperti Hasan berpendapat lain, bahwa perjanjian kredit tidak tepat dikuasai oleh ketentuan Bab XIII Buku III KUH Perdata, sebab antara perjanjian pinjam-meminjam dengan perjanjian kredit terdapat beberapa perbedaan. Perbedaannya, menurut Hasan terdapat pada hal-hal :⁴³

- a. Perjanjian kredit selalu bertujuan dan tujuan tersebut biasanya berkaitan dengan program pembangunan; biasanya dalam perjanjian kredit sudah ditentukan tujuan penggunaan uang yang akan diterima, sedangkan dalam perjanjian pinjam-

⁴² Mariam Darus Badrullzaman, *Op.Cit*, hlm. 110

⁴³ Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lainnya yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Dalam Pemisahan Asas Horisontal*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm.176

meminjam tidak ada ketentuan tersebut dan debitur dapat menggunakan uang secara bebas.

- b. Dalam perjanjian kredit sudah ditentukan bahwa pemberi kredit adalah bank atau lembaga pembiayaan, dan tidak dimungkinkan diberikan oleh individu, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam, pemberi pinjaman dapat dilakukan oleh individu.
- c. Pengaturan yang berlaku bagi perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam. Pada perjanjian kredit berlaku ketentuan UUD 1945, ketentuan bidang ekonomi dalam GBHN, ketentuan-ketentuan umum KUHPerdara, UU Perbankan, Paket Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Ekonomi terutama bidang perbankan, Surat-Surat Edaran Bank Indonesia dan sebagainya, sedangkan pada perjanjian pinjam meminjam tunduk semata-mata pada KUH Perdata Bab XIII Buku III.
- d. Pada perjanjian kredit dan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah telah ditentukan bahwa pengembalian uang pinjaman itu harus disertai bunga, imbalan, atau pembagian hasil, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam hanya berupa bunga saja, dan bunga inipun baru ada apabila diperjanjikan. Pada perjanjian kredit, kreditor harus mempunyai keyakinan akan kemampuan debitur akan pengembalian kredit

yang diformulasikan dalam bentuk jaminan baik materiil maupun immateriil, sedangkan pada perjanjian pinjam meminjam, jaminan merupakan pengaman bagi kepastian pelunasan hutang dan ini pun baru ada apabila diperjanjikan, dan jaminan itu hanya merupakan jaminan secara fisik atau materiil saja.

Perjanjian kredit adalah suatu perjanjian pokok yang bersifat riil artinya terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh kreditor kepada nasabah debitor. Perjanjian kredit harus diikuti dengan penyerahan uang secara riil kepada debitor. Dalam praktek, ada kemungkinan pinjaman yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit tidak jadi dicairkan. Ini terjadi jika kreditor mendapat informasi baru yang tidak menguntungkan tentang debitor. Ada juga kemungkinan bahwa besarnya jumlah yang diserahkan berlainan dengan jumlah yang semula disetujui di dalam perjanjian kredit.

Perjanjian kredit dilaksanakan berdasarkan atas kesepakatan diantara kedua belah pihak yaitu pihak kreditor dan pihak nasabah sebagai debitor, yang dilandasi dengan kepercayaan, terutama kepercayaan dari pihak kreditor sebagai pemberi kredit kepada debitornya.

Keberadaan perjanjian kredit sangat penting karena berfungsi sebagai dasar hubungan kontraktual antara para pihak.

Dalam perjanjian kredit dapat ditelusuri berbagai hal tentang pemberian, pengelolaan ataupun penatalaksanaan kredit itu sendiri. Untuk itu sangat perlu untuk diperhatikan bersama.

Wardoyo dalam Hermansyah mengemukakan bahwa perjanjian kredit itu memiliki tiga fungsi, yaitu :⁴⁴

- a. Berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan;
- b. Berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur;
- c. Berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

3. Bentuk Perjanjian Kredit

Menurut Budi Untung, secara yuridis terdapat 2 (dua) bentuk perjanjian atau pengikatan kredit yang digunakan oleh lembaga keuangan dalam memberikan kreditnya, yaitu :⁴⁵

- a. Perjanjian kredit di bawah tangan atau akta di bawah tangan, yaitu perjanjian pemberian kredit kepada nasabahnya yang

⁴⁴ Wardoyo dan Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, PT. Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm 72

⁴⁵ Budi Untung, *Op.Cit*, hlm.31

dibuat hanya di antara mereka (kreditor dan debitor) tanpa notaris.

Lazimnya dalam penandatanganan akta perjanjian kredit, saksi turut serta membubuhkan tandatangannya karena saksi merupakan salah satu alat pembuktian dalam perkara perdata;

- b. Perjanjian kredit notariil (otentik), yaitu perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat oleh atau dihadapan notaris.

Dari pengertian perjanjian kredit notariil tersebut, dapat ditemukan beberapa hal, antara lain :

- a. Yang berwenang membuat akta otentik adalah notaris, terkecuali wewenang tersebut diserahkan pada pejabat lain atau orang lain;
- b. Akta otentik dibedakan dalam yang dibuat “oleh” dan yang dibuat “di hadapan” pejabat umum;
- c. Isi dari akta otentik adalah :
 - 1). semua “perbuatan” yang oleh undang-undang diwajibkan dibuat dalam akta otentik;
 - 2). semua “perjanjian” dan “penguasaan” yang dikehendaki oleh mereka yang berkepentingan.
- d. Akta otentik memberikan kepastian mengenai penanggalan daripada aktanya yang berarti bahwa ia berkewajiban menyebut

dalam akta yang bersangkutan, tahun, bulan dan tanggal pada waktu akta tersebut dibuat.

Mengenai akta perjanjian kredit notariil atau otentik ini, terdapat beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu :

a. Kekuatan Pembuktian, terdapat 3 (tiga) macam, yaitu :

- 1). Pertama, membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang tertulis di dalam akta;
- 2). Kedua, membuktikan antara para pihak bahwa peristiwa yang disebutkan dalam akta sungguh-sungguh terjadi;
- 3). Ketiga, membuktikan tidak hanya antara para pihak tetapi pihak ketiga juga telah menghadap di muka pegawai umum (notaris) dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut ⁴⁶

b. Grosse Akta Pengakuan Hutang

Kelebihan dari akta perjanjian kredit atau pengakuan hutang yang dibuat secara notariil / otentik adalah dapat dimintakan Grosse Akta Pengakuan Hutang yang mempunyai kekuatan eksekutorial, artinya disamakan dengan keputusan hakim yang oleh bank diharapkan pelaksanaan eksekusinya tidak

⁴⁶ *Ibid*, hlm.33

perlu lagi melalui proses gugatan yang biasanya menyita waktu lama dan memakan biaya besar ⁴⁷

c. Ketergantungan terhadap Notaris

Bahwa notaris sebagai pejabat umum tetap juga sebagai seorang manusia biasa sehingga di dalam mengadakan perjanjian kredit atau pengakuan hutang oleh atau di hadapan notaris, tetap dituntut berperan aktif guna memeriksa segala aspek hukum dan kelengkapan yang diperlukan. Kemungkinan terjadi kekeliruan atas suatu perjanjian kredit atau pengakuan hutang yang dibuat secara notariil tetaplah ada. Dengan demikian *Account Officer* tidak boleh bergantung pada notaris, melainkan notaris harus dianggap sebagai mitra atau rekanan dalam pelaksanaan suatu perjanjian kredit. Dalam hubungan itu, maka bank akan meminta notaries yang bersangkutan untuk berpedoman kepada model perjanjian kredit yang telah ditetapkan oleh bank. Di samping itu, *Account Officer* tetap mengharapkan *legal opinion* dari notaris setiap akan mengadakan pelepasan kredit, sehingga notaris berperan sebagai salah satu unsur filterisasi daripada *legal aspect* suatu pelepasan kredit ⁴⁸

⁴⁷ *Loc.Cit*, hlm.33

⁴⁸ *Ibid*, hlm.34

C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

1. Sejarah Lahirnya Jaminan Fidusia

Munculnya jaminan fidusia sebagai solusi dalam mengatasi kelemahan dan kekurangan ketentuan peraturan hukum yang mengatur tentang lembaga *pand* (gadai). Hal itu dilatar belakangi dikarenakan lembaga *pand* (gadai) dirasakan sudah tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat.

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah *Fiduciare eigendom overdraft (FEO)*, yaitu penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan. Yang diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia.

Menurut A.Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitor), berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditor, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *yuridise-levering* dan hanya dimiliki oleh

kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitor), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitor, tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai *detentor* atau *houder* dan atas nama kreditur-*eigenaar*⁴⁹

Selain itu ketentuan dalam Pasal 1152 ayat 2 KUHPerdara yang mensyaratkan bahwa kekuasaan atas benda yang digadaikan tidak boleh berada pada pemberi gadai (*azas inbezitstelling*). Ini merupakan hambatan yang berat bagi gadai atas benda-benda bergerak berwujud, karena pemberi gadai tidak dapat menggunakan benda-benda tersebut untuk keperluannya.

Hambatan tersebut kemudian diatasi dengan mempergunakan lembaga fidusia yang diakui oleh Yurisprudensi Belanda tahun 1929 dan diikuti oleh *Arrest Hooggerechtshof* di Indonesia tahun 1932, bahwa pada hakekatnya dalam hal jaminan fidusia memang terjadi pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda berdasarkan kepercayaan antara Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia. Pengalihan hak kepemilikan dimaksud semata-mata sebagai jaminan bagi pelunasan utang bukan untuk seterusnya dimiliki oleh Penerima Fidusia.⁵⁰

⁴⁹ A. Hamzah dan Senjun Manulang, *Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*, (Jakarta : Indonesia Hiil, Co, 1984)

⁵⁰ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Op.Cit*, hlm. 35

Lahirnya *Arrest Hooggerechtshof* tersebut dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dari pengusaha-pengusaha golongan kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan sumber modal yang memerlukan fasilitas kredit untuk usahanya. Hal tersebut yang melatarbelakangi perlu dibentuknya suatu peraturan tentang Jaminan Fidusia yang pada akhirnya dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, selanjutnya undang-undang ini disebut dengan Undang-Undang Fidusia (UUF).

2. Pengertian Fidusia dan Jaminan fidusia

Di dalam Pasal 1 angka 1 UUF dimuat pengertian fidusia dan jaminan fidusia. Adapun pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.⁵¹

Selain itu dalam Pasal 1 angka 2 UUF terdapat istilah jaminan fidusia yang diartikan sebagai hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak

⁵¹ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008), hlm.35

tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.⁵²

Dari pengertian di atas, dapat diketahui unsur-unsur jaminan fidusia meliputi adanya hak jaminan; adanya obyek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan; benda yang menjadi obyek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia; dan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia.

Perjanjian Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi.⁵³

Dari pengertian di atas ditemukan bahwa hubungan hukum yang terjadi diantara para pihak adalah hubungan kepercayaan, pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia akan mengembalikan hak milik barang yang menjadi objek jaminan setelah pelunasan. Sebaliknya pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia tidak akan menyalahgunakan barang yang

⁵² *Ibid*, hlm.36

⁵³ *Loc.Cit*, hlm.36

menjadi jaminan fidusia yang sedang berada di dalam kekuasaannya itu.

Pada fidusia, berbeda dengan gadai, yang diserahkan sebagai jaminan kepada kreditor adalah hak milik sedang barangnya tetap dikuasai oleh debitor, sehingga yang terjadi adalah penyerahan secara *constitutum possessorium*. Benda jaminan masih tetap dikuasai oleh debitor dan debitor masih tetap dapat mempergunakan untuk keperluan sehari-hari.

3. Ciri-Ciri Jaminan Fidusia

Karakteristik dari jaminan fidusia sama dengan karakteristik dari jaminan kebendaan, ini dikarenakan jaminan fidusia merupakan bagian jaminan khusus yang bersifat hak kebendaan yang mempunyai ciri-ciri yang memberikan perlindungan secara sepenuhnya bagi kreditor diantaranya :⁵⁴

- a. mempunyai sifat absolut (mutlak), yaitu dapat dipertahankan atau dilindungi dari setiap gangguan pihak ketiga
- b. mempunyai sifat mengikuti bendanya (*droit de suite*), misalnya hak sewa senantiasa mengikuti bendanya, dan perjanjian tidak

⁵⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Jaminan : Komentar pasal demi pasal Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, (Jakarta : 2000), hlm.45

akan putus dengan berpindahnya atau dijualnya barang yang disewa

- c. mempunyai sifat prioritas (*droit de preference*), yaitu hak kebendaan mendahulukan hak yang terjadi dibanding dengan hak yang terjadi kemudian
- d. memenuhi asas *specialitas* dan publisitas sebagai implikasi sifat *droit de suite*, dari jaminan fidusia tersebut sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pihak yang berkepentingan
- e. mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya, dalam hal debitor cidera janji pemberi fidusia wajib menyerahkan objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Eksekusi dapat dilaksanakan dengan cara pelaksanaan title eksekutorial oleh penerima fidusia artinya langsung melakukan eksekusi tanpa lembaga parate eksekusi, atau penjualan objek jaminan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan.

4. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia

Antara subjek dan objek jaminan fidusia mempunyai kaitan yang sangat erat. Adapun yang menjadi subjek dari jaminan fidusia

adalah mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjian jaminan fidusia, dalam hal ini terdiri dari pemberi dan penerima fidusia.

Pasal 1 angka 5 UUF yang menyatakan bahwa “Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang dijadikan objek jaminan fidusia”. Dalam Pasal 1 angka 6 UUF selanjutnya dikatakan bahwa “Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia”.

Sehubungan dengan penyebutan “perseorangan” dalam hal pemberi fidusia dan penerima fidusia, maka hal ini sama dengan pemberi fidusia sebagai debitor perseorangan atau individu dan penerima fidusia sebagai kreditor perseorangan atau individu dalam pengikatan jaminan fidusia.

Namun demikian, yang bertindak sebagai pemberi fidusia adalah baik debitor itu sendiri maupun pihak ketiga. Dalam hal pemberi jaminan adalah debitor itu sendiri, maka disebut debitor pemberi fidusia, sedangkan dalam hal yang memberikan jaminan pihak ketiga, maka disebut pihak ketiga pemberi fidusia.⁵⁵

Objek jaminan fidusia adalah sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang terdaftar maupun tidak terdaftar (termasuk saham dan surat

⁵⁵ Oey Hoey Tiong, *Op.Cit*, hlm.181

berharga lainnya), yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Dalam pengertian benda termasuk pula piutang atas nama yang dahulu pengikatannya dengan cara gadai atau dalam istilah perbankan dikenal dengan *cessie* (dalam Pasal 613 KUHPerdara) yang kemudian dalam perkembangannya menjadi objek jaminan fidusia.

Objek jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam UUF dapat menggantikan *cessie* jaminan atas piutang yang disebut *suijling* sebagai *fiduciaire cessie* yang banyak dipergunakan lembaga perbankan dalam pemberian kredit. Selanjutnya objek jaminan fidusia dapat berupa benda yang dimiliki oleh pemberi fidusia saat pembebanannya, tetapi dapat pula dimasukkan ke dalam benda yang akan diperoleh di kemudian hari.⁵⁶

Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus disebut dengan jelas dalam akta jaminan fidusia. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh dikemudian hari. Dalam Pasal 10 UUF disebutkan bahwa kecuali diperjanjikan lain :⁵⁷

⁵⁶ Arie S Hutagalung, *Analisa Yuridis Pemberian dan Pendaftaran Fidusia*, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm.3

⁵⁷ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Op.Cit*, hlm. 38

- a. Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang dimaksud dengan 'hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia' adalah segala sesuatu yang diperoleh dari benda yang dibebani jaminan fidusia.
- b. Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek fidusia diasuransikan.

5. Terjadinya Jaminan Fidusia

Dalam proses terjadinya jaminan fidusia dilaksanakan melalui 2 tahapan yaitu :

a. Tahap Pembebanan Fidusia

Dalam Pasal 5 angka 1 UUF dinyatakan bahwa pembebanan jaminan fidusia harus dibuat dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia. Alasan undang-undang mengharuskan dengan akta notaris adalah :⁵⁸

- 1). Akta notaris adalah akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.
- 2). Objek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak
- 3). Undang-undang melarang adanya fidusia ulang

⁵⁸ Ratnawati W, Prasodjo, *Majalah Hukum Trisakti : Pokok-pokok Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2002), hlm.12

Isi dari akta perjanjian fidusia yang dibuat antara debitor dengan kreditor bahwa debitor akan mengalihkan kepemilikannya atas suatu benda kepada kreditornya sebagai jaminan atas suatu utang dengan kesepakatan ketentuan kepemilikan benda tersebut akan dikembalikan kreditor kepada debitor bilamana utangnya sudah dibayar lunas.

Isi akta jaminan fidusia dalam Pasal 6 UUF yang dimaksud sekurang-kurangnya memuat :⁵⁹

a). Identitas pemberi dan penerima fidusia;

Identitas meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.

b). Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia

Sesuai dengan sifat *accessoir* dari perjanjian peminjaman, maka perlu diketahui dengan pasti isi perjanjian pokok sebagai dasar pemberian penjaminan, karena eksistensi perjanjian penjaminan sangat tergantung dari perjanjian pokoknya. Yang dimaksud dengan data perjanjian pokok adalah mengenai perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.

⁵⁹ J.Satrio, *Hukum dan Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm.191

c). Uraian benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, cukup dengan mengidentifikasikan benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya.

d). Nilai penjaminan

Nilai penjaminan adalah nilai maksimum kreditor *preferen* atas hasil eksekusi benda jaminan. Hak *preferen* kreditor tidak bisa melebihi nilai penjaminan, tetapi biasanya kurang. Hal itu menyangkut sifat *assecoir* perjanjian penjaminan.

e). Nilai benda yang dijadikan objek jaminan fidusia

b. Tahap Pendaftaran Fidusia

Selain itu lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Fidusia yang menganut prinsip pendaftaran jaminan fidusia. Dalam Pasal 11 UUF disebutkan “benda” yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan tetapi sebaiknya dibaca “jaminan fidusia” harus didaftarkan, karena dari ketentuan-ketentuan lebih lanjut, bahwa demikian yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang.

Pendaftaran fidusia dilakukan melalui suatu permohonan yang ditujukan pada kantor pendaftaran fidusia. Pendaftaran

tersebut menganut asas spesialisasi seperti yang tercantum dalam Pasal 13 angka 2 UUF, yang pada dasarnya memenuhi ketentuan Pasal 6 UUF, sedang mengenai tanggal dan nomor akta serta tempat kedudukan notaris sudah terpenuhi ketentuannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Pasal 2 sub 4 yakni disyaratkan agar permohonan pendaftaran disertai dengan akta notaris.

Pendaftaran dicatat dalam buku pendaftaran fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal permohonan pendaftaran dan tanggal tersebut akan mempunyai dampak hukum yang besar karena tanggal tersebut mempengaruhi tanggal lahirnya jaminan fidusia (Pasal 14 angka 3 UUF), ini dimaksudkan agar tidak terjadi fidusia ulang yang dilakukan oleh debitur yang nantinya apabila itu terjadi maka akan batal demi hukum.⁶⁰

Kantor Pendaftaran Fidusia yang mencatat jaminan dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran guna melakukan pengecekan data setelah dilakukan pendaftaran, akan menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia.

⁶⁰ Sutan Remy, *Op.cit*, hlm. 45

Alat bukti bagi kreditor bahwa ia merupakan penerima jaminan fidusia adalah Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat ini sebenarnya merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal yang sama dengan data dan keterangan yang ada pada saat pernyataan pendaftaran.

Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, sehingga Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Maksudnya, bahwa putusan tersebut langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.⁶¹

6. Pengalihan Jaminan Fidusia

Pasal 19 UUF mengatakan Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru. Pengalihan hak atas piutang yang dimaksud adalah dengan

⁶¹ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Op.Cit*, hlm.41

cessie, yakni pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Dengan adanya *cessie* maka segala hak dan kewajiban penerima fidusia lama beralih kepada penerima fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada pemberi fidusia.⁶²

Pemberi fidusia juga dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara menggantinya dengan benda yang setara. Apabila pemberi fidusia wanprestasi maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan demi hukum menjadi objek jaminan fidusia sebagai pengganti dari objek jaminan yang dialihkan.

Pengalihan disini diartikan sebagai kegiatan menjual, menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya sedangkan yang dimaksud dengan setara tidak hanya nilainya tetapi juga jenisnya. Meskipun demikian pada dasarnya pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan pada pihak lain benda yang merupakan objek jaminan fidusia yang bukan merupakan barang persediaan, kecuali dengan izin tertulis dari penerima fidusia.⁶³

⁶² *Ibid*, hlm.44

⁶³ *Ibid*, hlm.45

7. Hapusnya Jaminan Fidusia

Pasal 25 Undang-Undang Fidusia mengatakan, bahwa :⁶⁴

Jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia
- b. Pelapasan atas hak jaminan fidusia oleh penerima fidusia
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Di dalam ketentuan Pasal 25 angka 1a UUF ini merupakan konsekuensi logis dari sifat jaminan fidusia sebagai perikatan yang bersifat *assecoir* atau mengikut pada perjanjian pokoknya. Lebih lanjut di dalam Pasal 25 angka 1b UUF mencerminkan penjabaran prinsip hukum perdata, yang mengatakan bahwa dalam hal undang-undang memberikan kepada yang bersangkutan suatu hak atau perlindungan untuk kepentingannya, maka terserahlah kepada yang bersangkutan untuk memanfaatkannya atau tidak.

Sehubungan dengan hapusnya jaminan fidusia, dalam Pasal 25 angka 2 UUF dikatakan musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransinya yang diatur dalam Pasal 10 huruf b UUF. Dengan demikian sekalipun perikatan itu hapus, namun uang santunan asuransi dianggap sebagai pengganti objek jaminan fidusia sejumlah hutang debitor kepada kreditor.

⁶⁴ Albertus Andi Prajitno, *Hukum Fidusia*, (Surabaya : Selaras, 2010), hlm.163

Hapusnya jaminan fidusia oleh penerima fidusia wajib diberitahukan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Di Kantor Pendaftaran Fidusia tersebut kemudian akan dilakukan pencoretan catatan daftar jaminan fidusia di buku daftar fidusia dan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bukti pendaftaran fidusia yang bersangkutan ini tidak berlaku lagi.

8. Eksekusi Jaminan Fidusia

Ketentuan eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 UUF yang menyatakan bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan 3 cara sebagai berikut :⁶⁵

- a. Pelaksanaan title eksekutorial oleh penerima fidusia
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan
- c. Penjualan di bawah tangan atas dasar kesepakatan pemberi dan penerima fidusia apabila dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Setelah lewat 1 bulan

⁶⁵ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Op.Cit*, hlm.46

sejak diberitahukan dan diumumkan minimal 2 surat kabar serta para pihak tidak ada yang mengajukan keberatan.

Mengenai objek jaminan yang berupa benda perdagangan atau efek yang dijual di pasar atau bursa, maka penjualannya dapat dilakukan ditempat-tempat tersebut berdasarkan ketentuan undang-undang. Dalam perjanjian fidusia yang melahirkan hak kebendaan yang didahulukan maka pembebanan jaminan fidusia diberikan semata-mata adalah untuk memberikan agunan atau jaminan pelunasan utang debitor terhadap kreditor sehingga setiap janji yang bertentangan dengan asas yang terdapat dalam hukum jaminan yaitu janji yang memberikan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah batal demi hukum.

Perlindungan terhadap pemberi fidusia diberikan pula bilamana nilai benda yang dijaminkan melebihi utang yang dijamin, dengan demikian penerima fidusia wajib mengembalikan, sebaliknya apabila hasil eksekusi tidak cukup untuk melunasi utangnya, debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Di Bawah Tangan di Koperasi Sumber Arto Wonosobo

Kebutuhan dana bagi seseorang merupakan hal yang biasa kita jumpai sehari-hari, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun guna memenuhi kebutuhan modal usaha di berbagai bidang bisnis. Di lain pihak juga ditemui ada sebagian orang atau kumpulan orang-orang atau lembaga maupun badan hukum yang memiliki kelebihan dana meskipun hanya bersifat sementara. Berdasar hal itulah dana yang berlebihan tersebut perlu diinvestasikan dengan cara yang paling menguntungkan secara ekonomis dan sosial.

Koperasi Sumber Arto di Wonosobo sebagai salah satu unit usaha ekonomi yang menyediakan dana ikut berperan serta dalam menyalurkan kredit atau pinjaman yang diajukan oleh anggota-anggotanya. Pemberian kredit yang disalurkan oleh koperasi pada prinsipnya bukan hanya semata-mata ditujukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk tujuan yang lebih bermanfaat yakni mensejahterakan anggotanya.

Pemberian kredit ini pada prinsipnya ditujukan bagi anggota koperasi saja. Anggota Koperasi Sumber Arto sebagian besar

merupakan masyarakat di pedesaan yang memiliki keterbatasan modal dalam menjalankan unit usaha yang mereka jalani. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan yang bukan anggota koperasi untuk memperoleh pinjaman asalkan bersedia memenuhi semua persyaratan yang diperjanjikan.

Dalam hal pemberian kredit atau pinjaman oleh pihak koperasi sendiri tetap memperhatikan syarat-syarat pemberian kredit yang baik sehingga kerugian yang nanti akan terjadi sekiranya dapat dihindarkan atau diminimalisir. Fasilitas kredit atau pinjaman yang diberikan oleh Koperasi Sumber Arto tentunya mengandung resiko sehingga mau tidak mau pelaksanaannya harus memperhatikan asas perkreditan yang sehat dan dituangkan dalam surat perjanjian tertulis.

Guna mengurangi resiko kerugian maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan melakukan pemilihan pemberian fasilitas kredit. Koperasi Sumber Arto melakukan pemilihan pemberian fasilitas pinjaman berdasarkan pada kemampuan calon debitur yang mengajukan permohonan untuk melunasi utang sesuai yang diperjanjikan, dan dengan menilai sehat atau tidaknya unit usaha yang dijalankan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan responden, guna memperoleh data akurat sebelum

memberikan kredit pihak koperasi terlebih dahulu melakukan penilaian secara seksama terhadap calon debitor meliputi :⁶⁶

1. Watak calon debitor
2. Kemampuan calon debitor
3. Modal calon debitor
4. Jaminan yang diberikan calon debitor
5. Prospek usaha yang dijalankan calon debitor

Prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh Koperasi Sumber Arto adalah sebagai berikut :⁶⁷

1. Pengajuan Kredit

Calon debitor mengajukan permohonan kredit atau pinjaman dengan cara mengajukan sendiri atau dengan surat penawaran yang ditawarkan tim marketing pihak Koperasi Sumber Arto ke masyarakat luas. Debitor yang mengajukan pinjaman mengisi formulir pinjaman serta menyertakan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan antara lain :

⁶⁶ Eko Budi Santoso, Manajer Koperasi Sumber Arto di Wonosobo, hasil wawancara tanggal 05 Januari 2012

⁶⁷ Eko Budi Santoso, Manajer Koperasi Sumber Arto di Wonosobo, hasil wawancara tanggal 05 Januari 2012

a. Debitor perorangan

Persyaratan kelengkapan administrasi dan legal yang dibutuhkan adalah :

- 1). Copy identitas diri / KTP debitor
- 2). Copy Kartu Keluarga debitor
- 3). Pas photo terbaru debitor
- 4). Copy tanda bukti kepemilikan jaminan berupa sertifikat atau tanda bukti lain seperti BPKB, STNK yang menjadi objek jaminan.
- 5). Nomor Pokok Wajib Pajak / NPWP (jika ada)
- 6). Copy Rekening Listrik / PDAM terbaru
- 7). Usaha yang dijalani setidaknya harus sudah berjalan kurang lebih selama 2 tahun
- 8). Aktifitas keuangan debitor / Neraca Laba Rugi usaha.

b. Debitor yang berbadan hukum (CV atau PT)

Persyaratan kelengkapan administrasi dan legal yang dibutuhkan adalah :

- 1). Copy identitas diri debitor / KTP debitor
- 2). Copy Kartu Keluarga debitor
- 3). Pas photo terbaru debitor

- 4). Copy tanda bukti kepemilikan jaminan berupa sertifikat atau tanda bukti lain seperti BPKB, STNK yang menjadi objek jaminan.
- 5). Nomor Pokok Wajib Pajak / NPWP (wajib disertakan untuk pinjaman Rp. 50.000.000,- juta ke atas)
- 6). Usaha yang dijalani setidaknya harus sudah berjalan kurang lebih selama 2 tahun
- 7). Aktifitas keuangan debitor / Neraca Laba Rugi usaha
- 8). Akta Pendirian Perusahaan
- 9). Copy bukti Izin Usaha (SIUP, TDP, WDP, SITU, IMB atau HO)
- 10). Usaha yang dijalankan merupakan target pasar

2. Penilaian Kredit

Setelah permohonan kredit disampaikan maka pihak Koperasi Sumber Arto kemudian menganalisis permohonan kredit tersebut. Analisis kredit yang dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi layak atau tidaknya suatu permohonan kredit disetujui diantaranya adalah :⁶⁸

⁶⁸ Eko Budi Santoso, Manajer Koperasi Sumber Arto di Wonosobo, hasil wawancara tanggal 05 Januari 2012

- a). Kebutuhan pemohon
- b). Karakter pemohon
- c). Modal usaha pemohon
- d). Kemampuan pemohon
- e). Kondisi pemohon
- f). Potensi usaha pemohon

Secara garis besar tahapan analisis kredit yang dilakukan meliputi tahap pengecekan surat-surat atau dokumen yang disertakan dalam permohonan dan tahap pengecekan Jaminan mengenai kebenaran dan keberadaan jaminan.⁶⁹

Atas pertimbangan permohonan kredit ini pihak Koperasi Sumber Arto harus menentukan disetujui atau ditolaknya permohonan debitor tersebut. Apabila diterima atau disetujui maka pihak koperasi sebagai kreditor berhak menentukan besarnya jumlah kredit yang akan diberikan yang mengacu pada objek jaminan yang diberikan oleh debitor sebagai agunan pelunasan utangnya. Apabila menolak permohonan harus memberikan alasan yang tepat dan dapat diterima serta diberitahukan kepada calon debitor tersebut.

⁶⁹ Eko Budi Santoso, Manajer Koperasi Sumber Arto di Wonosobo, hasil wawancara tanggal 05 Januari 2012

3. Pengambilan Keputusan

Setelah diverifikasi oleh manajer koperasi kemudian di negosiasikan kepada pimpinan koperasi perihal persetujuan pemberian kredit tersebut maka ditentukanlah besarnya jumlah kredit yang akan diberikan, Jumlah kredit yang dicairkan bisa sesuai dengan permohonan dari debitor, atau hanya disetujui sebagian kurang dari yang dimohonkan oleh debitor. Oleh karena itu untuk selanjutnya akan dikembalikan kepada debitor apakah yang bersangkutan mau menerima jumlah kredit yang sudah di putuskan bila pencairannya di bawah permohonan. Jika debitor menyetujui hasil putusan kredit atau pinjaman tersebut baru akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Putusan persetujuan kredit di Koperasi Sumber Arto berada di tangan pimpinan koperasi dan pelaksanaannya dilakukan oleh manajer koperasi. Putusan tersebut isinya antara lain :⁷⁰

- a). Pengajuan permohonan kredit sepenuhnya di setujui atau di tolak
- b). Pengajuan permohonan kredit disetujui meskipun tidak sebesar yang dimohonkan, dengan pertimbangan persyaratan lain misalnya jangka waktu yang diberikan tidak terlalu lama dari

⁷⁰ Eko Budi Santoso, Manajer Koperasi Sumber Arto di Wonosobo, hasil wawancara tanggal 05 Januari 2012

yang dimohonkan atau khusus untuk anggota yang pernah meminjam maka harus memperhatikan histori pembayaran angsuran kreditnya. Jika anggota tersebut belum melunasi pinjaman sebelumnya maka diberikan kesempatan untuk mengajukan pinjaman lagi setelah melakukan cicilan angsuran setengah jalan dari jangka waktu cicilan yang wajib dibayarkan setiap bulannya dengan ketentuan jumlah pinjaman kedua tidak boleh lebih besar dari pinjaman yang pertama.

4. Realisasi Kredit

Dari persetujuan kredit tersebut apabila debitor menyetujui besarnya pinjaman yang akan dicairkan maka debitor akan menandatangani perjanjian kreditnya. Di Koperasi Sumber Arto Wonosobo perjanjian kreditnya dituangkan dalam bentuk perjanjian pengakuan utang.⁷¹

Perjanjian pengakuan utang ini merupakan perjanjian pokok yang mendasari hubungan hukum hutang piutang antara debitor dan kreditor yang mengikatkan diri dan sepakat untuk tunduk

⁷¹ Eko Budi Santoso, Manajer Koperasi Sumber Arto di Wonosobo, hasil wawancara tanggal 05 Januari 2012

dalam ketentuan yang sudah diperjanjikan didalamnya. Perjanjian pengakuan utang ini berisikan ketentuan tentang :⁷²

a). Identitas Para pihak

memuat nama, alamat, pekerjaan pihak debitor selaku penerima hutang dan pihak kreditor selaku pemberi hutang

b). Jumlah dan angsuran pinjaman

Besarnya jumlah pinjaman yang dicairkan dan besarnya angsuran yang wajib dibayar oleh debitor setiap bulannya sampai jangka waktu yang telah disepakati.

c). Besarnya provisi, bunga, biaya administrasi, denda pinjaman

Ketentuan besarnya provisi ditetapkan 4% dari jumlah pinjaman yang dicairkan dan besarnya bunga yang wajib dibayar setiap ditentukan secara flat yakni sebesar 2% dari pinjaman. Selain itu pencairan pinjaman juga dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 12.000,- untuk biaya materai yang dikeluarkan. Untuk mengantisipasi keterlambatan pembayaran angsuran pihak Koperasi Sumber Arto juga telah menetapkan besarnya denda yang wajib dibayar setiap kali keterlambatan yakni sekitar 1 % dari angsuran pokok dan 4% jika terjadi keterlambatan pelunasan pinjaman.

⁷² Eko Budi Santoso, Manajer Koperasi Sumber Arto di Wonosobo, hasil wawancara tanggal 05 Januari 2012

d). Jangka waktu pinjaman

Kesepakatan antara debitor dan kreditor dalam hal jangka waktu pelunasan pinjaman yang diberikan.

e). Jaminan

benda atau barang yang mempunyai nilai yang dapat dijadikan agunan bagi kreditor sebagai pertimbangan dalam putusan pemberian kredit.

f). Kewajiban lain / biaya lain yang dikenakan perihal pinjaman

Dikenal dengan istilah biaya operasional yakni biaya yang dikeluarkan oleh pihak koperasi dalam upaya menarik jaminan jika debitor dianggap telah melakukan wanprestasi.

g). Ketentuan lain yang berkaitan dengan pemberian pinjaman

5. Pengikatan Jaminan

Selain perjanjian pengakuan utang ini dalam hal penyerahan jaminan kreditnya yang dipakai perjanjian jaminan fidusia. Pembebanan fidusia disini hanya berupa penyerahan surat-surat / dokumen kepemilikan yang sah dari objek jaminan fidusia yang dijaminkan sedangkan fisik jaminan kendaraan yang dijaminkan tetap berada dikekuasaan si debitor.

Selain pengikatan perjanjian kreditnya terhadap jaminan yang diberikan oleh debitor juga dilakukan pengikatan dengan

menggunakan fidusia, perjanjian fidusianya di Koperasi Sumber Arto Wonosobo sendiri tertuang dalam akta jaminan fidusia yang dibuat secara notariil yang menyesuaikan ketentuan dalam Pasal 6 UUF yang memuat hal-hal sebagai berikut :⁷³

a). Identitas para pihak

Berisi tentang uraian identitas diri dari pihak pemberi dan penerima fidusia yang memuat :

- 1). Nama
- 2). Alamat
- 3). Tempat dan tanggal lahir
- 4). Status marital
- 5). Nomor identitas diri / KTP
- 6). Agama

b). Data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia

Berisi tentang macam perjanjian dan besarnya hutang yang dijamin dengan fidusia yang wajib dilunasi oleh pemberi fidusia dengan mewajibkan membayar sejumlah bunga, biaya administrasi, dan biaya lain yang dikeluarkan dalam pembuatan akta ini.

⁷³ Eko Budi Santoso, Manajer Koperasi Sumber Arto di Wonosobo, hasil wawancara tanggal 05 Januari 2012

c). Uraian tentang Objek Jaminan Fidusia

Uraian benda yang menjadi jaminan dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut, dan menjelaskan tentang surat bukti kepemilikannya. Umumnya benda yang dijaminan oleh pemberi fidusia di Koperasi Sumber Arto adalah kendaraan bermotor beroda dua atau empat. Pengidentifikasian objek jaminan fidusia di Koperasi Sumber Arto Wonosobo meliputi : ⁷⁴

- 1). Merek kendaraan
- 2). Type kendaraan (untuk kendaraan bermotor beroda dua untuk dijaminan dibatasi minimal dengan mesin 2 tak)
- 3). Tahun pembuatan kendaraan
- 4). Nomor mesin
- 5). Nomor rangka
- 6). Nomor polisi
- 7). Warna kendaraan
- 8). Atas nama kepemilikan kendaraan
- 9). Nomor BPKP kendaraan
- 10). Nomor STNK kendaraan

⁷⁴ Eko Budi Santoso, Manajer Koperasi Sumber Arto di Wonosobo, hasil wawancara tanggal 05 Januari 2012

d). Nilai Penjaminan

Koperasi Sumber Arto Wonosobo sebagai pihak kreditor penerima fidusia harus menentukan besarnya nilai penjaminan yang harus ditetapkan dalam akta jaminan fidusia. Nilai penjaminan diperlukan untuk menentukan besarnya hak preferen yang dimiliki kreditor jika jaminan fidusia itu dieksekusi atau dijual terhadap debitor yang melakukan wanprestasi.

e). Nilai benda yang dijadikan objek jaminan fidusia

Pihak Koperasi mempunyai patokan harga mengenai berapa harga pasar dari benda objek jaminan fidusia misalnya harga pasaran kendaraan motor atau mobil yang selalu mengikuti perkembangan harga sewaktu-waktu.

Pengikatan benda jaminan fidusia disini dilakukan dengan penyerahan secara *constitutum possessorium* yakni dinyatakan bahwa benda yang dijadikan jaminan tetap dikuasai oleh pemberi fidusia. Penyerahan ini ditentukan sebagai cara yang sah untuk melahirkan hak jaminan kebendaan yang baru, walaupun penyerahannya tidak dilakukan secara nyata terhadap benda bergerak.

Dalam akta fidusianya sendiri mengatur tentang hak dan kewajiban yang mengikat pihak pemberi dan penerima fidusia yang dituangkan dalam pasal-pasal ketentuan yang wajib ditaati dan dipenuhi selama jangka waktu perjanjian ini berlaku.

Hal-hal yang dijabarkan dalam perjanjian tersebut hanya ditandatangani oleh debitor dan kreditor saja pada saat pencairan pinjaman, tanpa ada unsur paksaan dan telah terjadi kata sepakat, sehingga apabila terjadi wanprestasi debitor sudah tahu apa yang akan dilakukan kreditor. Pada pelaksanaannya tidak sampai terjadi eksekusi karena pihak Koperasi Sumber Arto selalu berupaya melakukan pendekatan kepada debitor wanprestasi untuk mengupayakan pelunasan utangnya secara kekeluargaan. Jika terjadi penjualan barang-barang milik debitor semata-mata merupakan itikad baik dari debitor sendiri untuk melunasi pinjamannya bukan karena paksaan eksekusi dari pihak Koperasi Sumber Arto Wonosobo.

Akta jaminan fidusia di Koperasi Sumber Arto Wonosobo ini dibuat secara notariil kemudian diperkuat dengan surat kuasa pernyataan penyerahan kendaraan bila debitor melakukan wanprestasi yang dibubuhi materai dan ditandatangani oleh debitor. Meskipun dibuat secara notariil perjanjian dengan jaminan fidusia di

Koperasi Sumber Arto ternyata tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

Penulis berpendapat ketentuan pendaftaran jaminan fidusia yang tidak dipenuhi oleh pihak Koperasi Sumber Arto Wonosobo merupakan bentuk pelanggaran aturan tentang jaminan fidusia yang sudah disyaratkan dalam Pasal 11 UUF yang menyatakan benda yang dibebankan dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.

Sebenarnya tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa fidusia yang tidak didaftarkan tidak sah, hanya saja untuk memenuhi ketentuan untuk dapat dijadikan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Bentuk pelanggaran seperti itu sebenarnya justru akan merugikan pihak kreditor itu sendiri karena kreditor dianggap melakukan pembohongan mengenai keabsahan jaminan fidusia yang dibuatnya, dan dapat diancam dengan ketentuan pidana yang sudah diatur dalam Pasal 35 UUF yakni dapat dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda sedikitnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Akibat lainnya perjanjian jaminan fidusia tersebut hanya dianggap sebagai perjanjian hutang piutang biasa. Terkait dengan masalah pendaftaran fidusia sebenarnya merupakan hak

keistimewaan bagi kreditor karena setelah didaftarkan jaminan fidusia lahir dan kedudukan kreditor menjadi lebih diutamakan dan lebih kuat kedudukannya dibanding kreditor lainnya. Karena jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tidak mempunyai hak didahulukan atau hak preferen baik di dalam maupun luar kepailitan dan atau likuidasi.

Antisipasi yang dilakukan oleh pihak Koperasi Sumber Arto Wonosobo untuk menghindari debitor wanprestasi dengan membuat surat pernyataan dan surat kuasa untuk mengambil alih kendaraan yang dijadikan objek jaminan merupakan instrumen yang dipergunakan oleh pihak koperasi dalam memberikan efek jera dan menghimbau agar debitor selalu menaati kewajiban dalam membayar angsuran kredit secara rutin tiap bulannya dan wajib ditandatangani oleh debitor.⁷⁵ Dengan cara demikian diharapkan debitor dapat diminimalisir melakukan wanprestasi.

⁷⁵ Eko Budi Santoso, Manajer Koperasi Sumber Arto di Wonosobo, hasil wawancara tanggal 05 Januari 2012

B. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Di Bawah Tangan Di Koperasi Sumber Arto Wonosobo

Untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka dibuatlah akta jaminan fidusia dengan akta notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Setelah dilakukan pendaftaran maka kreditor akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan di mata hukum karena dalam sertifikat tersebut memuat irah-irah “ DEMI KEADILAN BERDASAR KETUHANAN YANG MAHA ESA “. Dengan demikian memiliki kekuatan eksekutorial langsung apabila debitor melakukan wanprestasi terhadap perjanjian fidusia (parate eksekusi).

Pada pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tentunya memiliki resiko yang sangat besar terhadap kedudukan kreditor itu sendiri. Dikarenakan secara hukum perjanjian tersebut dianggap tidak kuat untuk melakukan eksekusinya sehingga perlindungan hukum bagi kreditor penerima fidusia menjadi tidak terjamin.

Jaminan fidusia yang tidak di daftarkan atau dibuat di bawah tangan akan menimbulkan akibat hukum. Apabila kreditor melakukan eksekusi secara sepihak karena dianggap memiliki hak akan tetapi dengan tindakan tersebut debitor dapat mengatakan bahwa kreditor

bertindak sewenang-wenang apalagi jika debitor telah melaksanakan sebagian dari kewajibannya sesuai yang diperjanjikan. Bisa dikatakan bahwa di atas barang atau benda jaminan tersebut terdiri dari sebagian hak kreditor dan sebagian lagi hak debitor. Tindakan seperti itu bisa dimasukkan dalam kategori perbuatan melawan hukum yang akan membawa dampak negatif sendiri bagi kreditor penerima fidusia.

Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia diperlukan suatu perlindungan hukum bagi para pihak. Perlindungan hukum secara hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. secara umum perlindungan hukum preventif disini ditujukan untuk mencegah terjadinya sengketa berbeda dengan perlindungan hukum represif yang ditujukan untuk menyelesaikan sengketa.

Penulisan tesis ini hanya menguraikan perlindungan hukum bagi Koperasi Sumber Arto Wonosobo selaku pihak kreditor penerima fidusia mengingat benda jaminan berada ditangan debitor sehingga apabila debitor wanprestasi diperlukan suatu perlindungan hukum agar kepentingan kreditor terjamin. Adapun perlindungan hukum tersebut ada 2 macam, yaitu :⁷⁶

⁷⁶ Eko Budi Santoso, Manajer Koperasi Sumber Arto di Wonosobo, hasil wawancara tanggal 05 Januari 2012

a. Perlindungan hukum secara umum

Ketentuannya sudah diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Dari pengertian diatas seseorang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian maka sejak saat itu pula semua harta kekayaan baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada secara otomatis menjadi tanggungan untuk segala perikatan meskipun kekayaan tersebut tidak diserahkan atau dinyatakan secara tegas sebagai jaminan.

Lebih lanjut lagi dalam Pasal 1132 KUHPerdara menyebutkan kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali ada diantara berpiutang itu ada alasan yang sah untuk didahulukan.

Kreditor demikian dinamakan kreditor konkuren yang harus berbagi secara seimbang dengan kreditor lainnya guna memperoleh suatu pelunasan utang. Hal itu dapat dirasakan sebagai suatu kerugian karena besarnya masing-masing piutang yang dimiliki oleh masing-masing kreditor tentunya berbeda dan

dari hasil penjualan harta debitor nantinya akan dibagi secara berimbang dengan kreditor lain.

Ketentuan jaminan fidusia sebenarnya memberikan posisi yang istimewa bagi pihak kreditor karena didahulukan dalam pelunasan piutang yang dimilikinya kreditor preferen hanya saja dari segi hukum untuk dapat memiliki kekuatan hukum seperti itu setiap jaminan fidusia yang dibuat wajib didaftarkan. Hal ini yang wajib dilakukan oleh pihak koperasi untuk mendapat perlindungan hukum lebih kuat dan terjamin kepastian hukumnya.

Pada prakteknya memang tidak demikian adanya karena pihak koperasi masih berpegang dan melaksanakan prinsip koperasi yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, bertujuan dan mensejahterakan anggotanya sehingga tidak terlalu menganggap ketentuan itu sebagai aturan yang mendesak.⁷⁷

Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan otomatis tidak memberikan kedudukan yang mendahului kepada kreditor penerima fidusia terhadap kreditor lain (Pasal 27 UUF) karena apabila kreditor mendaftarkan maka akan timbul hak yang didahulukan terhadap benda yang didaftarkan tersebut. Sehingga Koperasi Sumber Arto hanya memiliki hak konkuren atas barang

⁷⁷ Eko Budi Santoso, Manajer Koperasi Sumber Arto di Wonosobo, hasil wawancara tanggal 05 Januari 2012

milik debitor tersebut artinya jika si debitor mempunyai pinjaman di tempat lain dan si kreditor memakai jaminan fidusia yang didaftarkan maka hak yang dimiliki oleh Koperasi Sumber Arto Wonosobo dapat dikalahkan oleh karena itu untuk lebih memproteksi hal demikian hendaknya akta notariil jaminan fidusia tersebut didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

b. Perlindungan hukum secara khusus

Secara khusus perlindungan hukum yang diberikan pada kreditor terdapat dalam syarat umum perjanjian kredit di Koperasi Sumber Arto Wonosobo yang termuat dalam perjanjian pengakuan utang mengenai kewajiban debitor guna melindungi kepentingan kreditor penerima fidusia atas perjanjian yang dibuatnya.

Pemberian pinjaman dengan dasar perjanjian kredit dan surat kuasa untuk mengambil kendaraan secara psikologis mendorong debitor untuk memenuhi kewajibannya melunasi utang sejalan dengan tujuan adanya pengikatan jaminan fidusia termasuk di dalamnya yang dimaksudkan untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada pihak kreditor untuk memperoleh pelunasan dari jaminan tersebut jika debitor wanprestasi.

Perlindungan hukum secara demikian dirasakan tidak sejalan dengan apa yang sudah diatur dalam UUF karena pihak kreditor

dalam hal ini Koperasi Sumber Arto Wonosobo hanya berkedudukan sebagai kreditor konkuren sehingga pihak Koperasi Sumber Arto Wonosobo harus berupaya sendiri untuk memperoleh pelunasan piutangnya jika debitornya wanprestasi dengan upaya pencegahan antara lain pihak kreditor mencantumkan ketentuan memberikan kuasa kepada pihak koperasi untuk mengambil kendaraan untuk membayar seluruh utang debitor atau memaksa debitor untuk bertanggung jawab untuk membayar sisa utangnya apabila hasil penjualan kendaraan tersebut tidak cukup melunasi utang debitor.

Selain itu salah satu bentuk tertib administrasi di Koperasi Sumber Arto akhir-akhir ini sudah mulai menerapkan sistem informasi debitor (SID) seperti yang digunakan lembaga perbankan ketika menerima permohonan pengajuan kredit dari calon debitor⁷⁸. Sistem Informasi Debitor ini berfungsi untuk melihat *track record* catatan financial calon debitor di keseluruhan lembaga keuangan dan pembiayaan yang lebih dikenal dengan Checking BI. Keuntungan menggunakan SID ini juga menjadi salah satu bentuk upaya perlindungan hukum bagi kreditor apabila debitor wanprestasi.

⁷⁸ Eko Budi Santoso, Manajer Koperasi Sumber Arto di Wonosobo, hasil wawancara tanggal 05 Januari 2012

Dalam *history* SID, dapat dilihat bagaimana aktifitas kelancaran pembayaran angsuran pinjaman di lembaga keuangan dan pembiayaan sebelumnya yang telah memberi pinjaman kepada calon kreditor sehingga dapat dinilai apakah calon debitor tersebut dapat dikatakan bersih dari daftar hitam / *black list* atau sedang terkena sanksi dari Bank Indonesia karena dianggap bermasalah karena kredit macet dan sebagainya.

Pihak Koperasi Sumber Arto dalam memberikan kredit atau pinjaman selalu menggunakan prinsip kehati-hatian agar kerugian yang bisa ditimbulkan dapat dihindarkan sehingga sejak awal pengajuan kredit, calon debitor benar-benar di analisis kemampuannya apakah benar layak untuk mendapat kredit.

Berdasar hasil rekening koran SID jika terdapat keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman di lembaga keuangan sebelumnya maka calon debitor sudah tidak dipercaya lagi untuk mendapatkan pinjaman dari Koperasi Sumber Arto karena dianggap dapat menjadi masalah di kemudian hari sehingga pihak koperasi akan menolak permohonan pengajuan kreditnya.⁷⁹

⁷⁹ Eko Budi Santoso, Manajer Koperasi Sumber Arto di Wonosobo, hasil wawancara tanggal 05 Januari 2012

Perlindungan hukum bagi Koperasi Sumber Arto terasa biasa saja karena pihak Koperasi Sumber Arto menanggapi hal tersebut sebagai suatu hal yang biasa yang tidak perlu mendapat perhatian lebih karena selama ini debitor yang melakukan wanprestasi dapat menyelesaikan utangnya walaupun pada akhirnya memerlukan proses penyelesaian yang memakan waktu lama dan mundur dari tenggang waktu yang sudah diperjanjikan.

Kebijakan Koperasi Sumber Arto Wonosobo tersebut dengan catatan agar debitor mau memenuhi semua kewajibannya sampai tuntas meskipun oleh debitor sendiri pada akhirnya terpaksa menjual barang milik debitor itu sendiri untuk pelunasan utang kepada koperasi. Hal senada juga diungkapkan oleh debitor yang telah beberapa kali meminjam ke pihak koperasi. Meskipun pada akhirnya harus melakukan penjualan barang milik debitor guna pelunasan utangnya kesemua prosedurnya diselesaikan secara damai dan musyawarah.⁸⁰

Pihak debitor tidak terlalu mau dipusingkan atau berurusan dengan prosedur perjanjian yang seharusnya ditempuh, karena berprinsip asalkan permohonan pinjaman disetujui pihaknya sudah dapat menerima semua kebijakan dan mengetahui benar apa yang

⁸⁰ Karsidi, Debitor Koperasi Sumber Arto Wonosobo, hasil wawancara tanggal 05 Januari 2012

akan dilakukan pihak kreditor lakukan di kemudian hari sehingga berupaya dengan cara apapun untuk memenuhi kewajibannya tersebut.⁸¹

Kondisi di atas mendukung perjanjian jaminan fidusia yang dibuat di bawah tangan dapat direalisasikan secara nyata tanpa menyebabkan timbulnya suatu perbuatan melawan hukum, karena pihak koperasi sampai saat ini belum pernah melakukan eksekusi terhadap jaminan karena masih menunggu itikad baik debitor untuk menyelesaikan kewajibannya dengan hanya menahan dan mengamankan jaminan tersebut.

Dalam praktek penandatanganan akta perjanjian kredit, terutama untuk objek jaminan fidusia tidak selaku diikat dengan akta Jaminan Fidusia, dan dengan sendirinya jaminan tidak dibebani dengan jaminan fidusia dan tidak didaftarkan. Objek jaminan fidusia tidak diikat dengan akta Jaminan Fidusia dikarenakan kreditor atau Penerima Fidusia telah melakukan analisis yang cermat mengenai watak serta kemampuan seorang debitor atau Pemberi Fidusia, disamping objek jaminan fidusia tersebut merupakan jaminan tambahan, karena pada saat yang sama debitor atau Pemberi Fidusia telah menyerahkan beberapa

⁸¹ Karsidi, Debitor Koperasi Sumber Arto Wonosobo, hasil wawancara tanggal 05 Januari 2012

jaminan untuk diikat dengan perjanjian kredit, sehingga kreditor menganggap jaminan tersebut sudah cukup.

Alasan yang lain tidak dibebaninya objek jaminan fidusia dan tidak dibuatnya akta Jaminan Fidusia, dikarenakan *plafond* yang diterima oleh debitor atau Pemberi Fidusia dari kreditor atau Penerima Fidusia adalah kurang dari Rp. 250.000.000,- (duaratus limapuluh juta rupiah) dan perjanjian kredit yang dibuat antara debitor atau Pemberi Fidusia dengan kreditor atau Penerima Fidusia dibuat secara dibawah tangan. Sedangkan alasan yang terakhir adalah faktor biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang debitor atau Pemberi Fidusia untuk membebani objek jaminan fidusia dan mendaftarkannya ke kantor Pendaftaran Fidusia.

Dalam praktek penandatanganan perjanjian kredit, tidak dibebani dan tidak didaftarkannya akta Jaminan Fidusia ke kantor Pendaftaran Fidusia, antara debitor atau Pemberi Fidusia dan kreditor atau Penerima Fidusia telah mengetahui sudah tahu betul apa yang akan dilakukan masing-masing pihak, sehingga akibat hukum yang timbul dikemudian hari sudah diketahui oleh masing-masing pihak, dan kemungkinan untuk debitor wanprestasi sangat kecil.

Kelalaian atau kesengajaan terhadap pembebanan jaminan fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia baik yang disebabkan

pemberi, penerima fidusia atau notaris itu sendiri dapat dianggap melakukan suatu perbuatan melanggar hukum. Kelalaian ini sebagai akibat dari ketidakjelasan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan fidusia yang tidak merinci dengan tegas sampai kapan pendaftaran jaminan fidusia harus didaftarkan setelah penerima fidusia dan pemberi fidusia menandatangani akta jaminan fidusia di hadapan notaris.

Dalam UUF hanya mengatur secara tegas mengenai kewajiban pembebanan dan pendaftaran fidusia serta sanksi akibat adanya kesengajaan atau kelalaian apabila para pihak tidak membebani objek jaminan fidusia dan tidak mendaftarkan jaminan fidusia tersebut. Oleh karena itu dirasakan perlu adanya perbaikan terhadap UUF yang sudah ada untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisa penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam praktiknya sebagian besar pelaksanaan pengikatan jaminan fidusia di Koperasi Sumber Arto Wonosobo dilakukan di bawah tangan. Hal-hal yang dijabarkan dalam akta tersebut hanya ditandatangani oleh debitor selaku pemberi fidusia dan kreditor selaku penerima fidusia. Meskipun demikian ada juga pengikatan objek jaminan fidusia di Koperasi Sumber Arto Wonosobo dilakukan dengan akta notaris, akan tetapi akta jaminan fidusia yang sudah dibuat tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Alasan yang melatarbelakangi pihak koperasi sebagai kreditor penerima fidusia mengambil sikap tersebut mengingat besarnya jumlah *plafond* kredit atau pinjaman yang diberikan kepada debitor relatif kecil serta menghemat waktu dan biaya dalam proses pemberian kreditnya.

2. Perlindungan hukum bagi pihak Koperasi Sumber Arto Wonosobo selaku kreditor penerima fidusia yang memakai perjanjian jaminan fidusia yang dibuat di bawah tangan atau tidak didaftarkan, tampak dalam syarat umum perjanjian kredit di Koperasi Sumber Arto Wonosobo yang termuat dalam perjanjian pengakuan utang mengenai kewajiban debitor guna melindungi kepentingan kreditor penerima fidusia dan diperkuat dengan adanya klausul penyerahan benda atau objek jaminan fidusia jika debitor wanprestasi dengan surat kuasa penyerahan kendaraan yang wajib ditandatangani debitor dan dibubuhi materai secukupnya. Ketentuan tersebut secara psikologis mendorong debitor untuk memenuhi kewajibannya melunasi utang sejalan dengan tujuan adanya pengikatan jaminan fidusia termasuk di dalamnya yang dimaksudkan untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada pihak kreditor untuk memperoleh pelunasan dari jaminan tersebut jika debitor wanprestasi. Meskipun demikian pada pelaksanaan ketentuan di atas sangat dihindari oleh pihak koperasi sendiri karena pada prinsipnya koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya dan lebih bersifat kekeluargaan.

B. Saran

1. Pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia di Koperasi Sumber Arto Wonosobo yang dilakukan di bawah tangan disarankan agar setiap pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia yang dibuat wajib didaftarkan karena pendaftaran itu sendiri sebenarnya guna melindungi kepentingan kreditor selaku penerima fidusia sendiri dalam hal ini Koperasi Sumber Arto Wonosobo.
2. Pembebanan dan Pendaftaran fidusia sesuai dengan UUF akan melahirkan sertifikat jaminan fidusia yang lebih menjamin kepastian hukum kedudukan kreditor. Kreditor penerima fidusia memiliki keistimewaan dibandingkan dengan kreditor lainnya yakni didahulukan dalam memperoleh pelunasan piutangnya, sehingga dirasakan lebih efektif untuk melindungi kepentingan kreditor dari wanprestasi seorang debitor. Selain itu juga pembebanan dan pendaftaran fidusia sesuai dengan UUF akan memberikan perlindungan hukum yang jelas dan kuat untuk setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak kreditor dalam mengantisipasi debitor yang melakukan wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

A. Hamzah dan Senjun Manulang, *Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*, (Jakarta : Indonesia Hiil, Co, 1984)

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004)

_____, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000)

_____, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992)

Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, (Yogyakarta : Pohon Cahaya, 2011)

Albertus Andi Prajitno, *Hukum Fidusia*, (Surabaya : Selaras, 2010)

Arie S. Hutagalung, *Analisa Yuridis Pemberian dan Pendaftaran Fidusia*, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003)

Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*. (Yogyakarta : Andi Offset, 2000)

Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lainnya yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Dalam Pemisahan Asas Horisontal*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996)

Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997)

J.Satrio, *Hukum dan Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007)

Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung : PT. Pradnya Paramita, 1975)

Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1994)

_____, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991)

Moh. Tjoekam, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial (Konsep dan Teknik Kasus)*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1999)

Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-Dasar Tehnik Pemberian Management Kredit*, (Jakarta : Bina Aksara, 1989)

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005)

Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, (Jakarta : Gahlia Indonesia, 1985)

Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008)

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung : Alumni, 1977)

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yumetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990)

Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersil*, (Jakarta : PT. Aksara Persada Indonesia, 1988)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986)

Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Internusa, 1992)

_____, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung : Cipta Aditya Bakti, 1991)

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta : Liberty, 1986)

Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001)

Thomas Suyatno, et al., *Dasar-dasar Perkreditan*, (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003)

Wardoyo dan Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : PT. Kencana Prenada Media Group, 2006)

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

C. Majalah, Surat Kabar, Internet

Ratnawati W, Prasodjo, *Majalah Hukum Trisakti : Pokok-pokok Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2002)

Sutan Remy Sjahdeini, *Makalah Hukum Jaminan : Komentor pasal demi pasal Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Jakarta, yang disampaikan dalam sosialisasi UU Nomor 42 Tahun 1999